

**PENELITIAN DOSEN
KERJASAMA IAKN AMBON DENGAN LITBANG SINODE GPM**

LAPORAN PENELITIAN



**Analisis Dampak akan Beroperasinya Penambangan Migas Blok Masela
Terhadap Perubahan Tatahan Sosial Masyarakat
di Klasis GPM Tanimbar Selatan**

Peneliti :

1. Dr. Johanna S. Talupun, M.Th
2. Febby N. Patty, D.Th
3. Pdt. Jenne J.R. Pieter, MA
4. Nelvia Joseph, S.Si

**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
2021**

PERNYATAAN ORISINAL LAPORAN HASIL PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Johanna S. Talupun, M.Th (Ketua Tim Peneliti)

NIP : 197305282001122001

Fakultas/Prodi : Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan/ Teologi

Judul Penelitian : Analisis Dampak akan Beroperasinya penambangan Migas Blok Masela Terhadap Perubahan Tatanan Sosial Masyarakat di Klasis GPM Tanimbar Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian tim saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan sebutan dalam daftar pustaka.

Ambon, Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan

Ketua Tim Peneliti



Dr. Johanna S. Talupun, M.Th
NIP.197305282001122001

IDENTITAS PENELITIAN

Judul Penelitian : Analisis Dampak akan Beroperasinya penambangan Migas Blok Masela Terhadap Perubahan Tatahan Sosial Masyarakat di Klasis GPM Tanimbar Selatan

Nama Peneliti : Ketua Tim : Dr. Johanna S. Talupun, M.Th
Anggota :
1. Febby N. Patty, D.Th
2. Pdt. Jenne J.R. Pieter, MA
3. Nelvia Joseph, S.Si

Bidang Ilmu Penelitian : Sosial - Teologi

Jenis Penelitian : Penelitian kerjasama

Objek Penelitian : Jemaat GPM Lermatang – Kalsis Tanimbar Selatan

Masa Pelaksanaan : 2 Bulan

Penelitian

Mulai Bulan : Oktober

Selesai Bulan : November

Lokasi Penelitian : Jemaat GPM Lermatang – Kalsis Tanimbar Selatan

Biaya Penelitian : **Rp. 25.000.000**

LEMBARAN PERSETUJUAN

PENELITIAN DOSEN KERJASAMA IAKN AMBON DENGAN LITBANG SINODE GPM

Judul Penelitian : Analisis Dampak akan Beroperasinya penambangan Migas Blok Masela Terhadap Perubahan Tataan Sosial Masyarakat di Klasis GPM Tanimbar Selatan

Nama Peneliti : Ketua Tim : Dr. Johanna S. Talupun, M.Th
Anggota :
4. Febby N. Patty, D.Th
5. Pdt. Jenne J.R. Pieter, MA
6. Nelvia Joseph, S.Si

Fakultas/Prodi : Fakultas Ilmu Sosial keagamaan/ Teologi
Biaya Penelitian : **Rp. 25.000.000**

Ambon, Desember 2021

Mengetahui

Ketua LPPM IAKN Ambon



Dr. Johanna S. Talupun, M.Th
NIP. 197305282001122001

Ketua Tim Peneliti



Dr. Johanna S. Talupun, M.Th
NIP. 197305282001122001

Menyetujui
Rektor



Dr. Agusthina Ch. Kakiay, M.Si
NIP. 197308082000032002

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Dr. Johanna S. Talupun, M.Th
NIP : 197305282001122011
Nama Anggota* :
1. Febby N. Patty, D.Th
2. Pdt. Jenne J.R. Pieter, MA
3. Nelvia Joseph, S.Si
Judul Penelitian : Analisis Dampak Rencana Pengoperasian Pembangunan Migas Blok Masela Terhadap Perubahan Tatahan Sosial Masyarakat di Klasis GPM Tanimbar Selatan

Pada hari Sabtu tanggal 20 Bulan Desember tahun 2021, telah dilaksanakan seminar laporan hasil penelitian dosen, Kerjasama IAKN Ambon dengan Litbang Sinode GPM tahun anggaran 2021.

TIM PENILAI

Nama : Prof. Dr.Ir. Marcus Tukan,BSE,MT
NIP.19590825 1986 10 1 001

Nama : Dr. Agusthina Ch. Kakiay, M.Si
NIP. 19730808 2000 03 2 002

Mengesahkan
Rektor IAKN Ambon

Dr. Agusthina Ch. Kakiay, M.Si
NIP. 197308082000032002

Menyetujui
Ketua LPPM IAKN Ambon

Dr. Johanna S. Talupun, M.Th
NIP. 197305282001122001

ABSTRAK

Kegiatan penambangan migas Blok masela baru akan dimulai namun sampai dengan saat ini dampak yang dirasakan masyarakat sudah ada. Masyarakatpun telah mengalami perubahan tatanan sosial sebagai akibat dari rencana pengoperasian penambangan migas ini. Dampak yang timbul dari rencana pengoperasian ini mengarah pada dampak positif dan negatif. Penelitian ini dilakukan di Jemaat GPM Lermatang karena di lokasi Jemaat ini akan dijadikan sebagai lokasi pusat penambangan migas dan pengoperasian di darat berpusat di Lermatang. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan wawancara pada beberapa anggota masyarakat, pelaku ekonomi dalam hal ini penjualan tanah, baik masyarakat, pada maupun masyarakat pengusaha. Disamping itu, peneliti juga menggunakan data tertulis yang bersumber dari jemaat. Pembedaan masyarakat sebagai referensi tambahan bagi penguatan analisis.

Dari hasil penelitian, dijumpai bahwa dampak positif yang telah kelihatan adalah bahwa masyarakat sudah mulai menyiapkan SDM nya sehingga kelak bisa difungsikan juga pada perusahaan migas ini. Beberapa tahun ini Pemda telah memfasilitasi pendidikan dalam kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Cepu. Sebagai akibat dari rencana pengoperasian ini, maka masyarakat telah menjual tanah untuk kelak dijadikan lahan operasi migas. Sejak penjualan tanah, mereka memiliki peningkatan gaya hidup yang sesungguhnya lebih modern. Hal yang negatif. Penjualan tanah membuat masyarakat menjadi kaya sesaat tetapi kemudian menjadi melarat juga. Hal ini disebabkan karena pengetahuan dan sikap yang tepat dalam pengelolaan keuangan belum dimiliki secara baik.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya maka penelitian ini telah selesai dengan baik. Disadari sungguh bahwa terlaksannya penelitian sampai pada perampungan hasil, tidak lepas dari berbagai pihak yang turut menopang tim penelitia dalam melaksanakan penelitian ini. kami patut berterima kasih kapeada semua pihak atas dukungannya.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberika kontribusi bagi grtrja dalam menentukan sikapNya tetapi juga dalam melakukan pemetaan terhadap kebutuhan umat dan masyarakat. Demikian pula dengan pemerintah daerah. Semoga hasil penelitian ini dapat berkontribusi bagi pemerintah darah Tanimbar Selatan dalam menentukan kebijakan pemabngunan.

Demikian laporan ini dibuat, semoga berguan bagi jemaat dan masyarakat.

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman pernyataan orisinalitas penelitian	ii
Halaman identitas penelitian	iii
Halaman persetujuan	iv
Halaman lembar pengesahan.....	v
Abstrak	vi
Kata pengantar	vii
Daftar isi	viji
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4. Urgensi Penelitian	5
Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori	5
Metode Penelitian	10
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	13
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	52
3.1. Pengetahuan Masyarakat Tentang Proyek <i>Lng</i> Abadi Blok Masela	52
3.2.Sikap Masyarakat Terkait Proyek <i>Lng</i> Abadi Blok Masel	60
3.3.Peran Gereja menyiapkan umat menyambut beroperasinya penambangan Migas Blok Masela	73
BAB IV PENUTUP	79
4.1.Kesimpulan	79
4.2.Pikiran Rekomendatif	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN:	
▪ Jadwal Pelaksanaan Penelitian	ix
▪ Surat Ijin Penelitian	
▪ Surat Bukti telah melaksanakan penelitian	
▪ Kontrak penelitian yang telah ditandatangani bermeterai	
▪ Dokumentasi	x

JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN*

	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.	Desember
Persiapan Penelitian						
Pelaksanaan Penelitian						
Analisis Data dan Penulisan						
Penyusunan Laporan						
Seminar Hasil Penelitian						
Revisi						
Pengumpulan Laporan						

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Secara makro di Indonesia dan secara mikro di Maluku, terdapat kekayaan sumberdaya alam. Sumberdaya alam yang dimiliki, tersebar diberbagai wilayah di Indonesia. Kekayaan sumberdaya alam Indonesia ini sudah terkenal sejak jaman dulu. Hal inilah yang menyebabkan kaum kolonial itu datang ke Indonesia demi mengincar kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki oleh Indoensia. Kekayaan sumberdaya alam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seluruh potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Walter Isard mendefenisikan sumberdaya alam sebagai keadaan lingkungan dan bahan-bahan mentah yang dapat dimanfaatkan manusia demi memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan¹. Defenisi itu mengisyaratkan bahwa kekayaan sumberdaya alam itu akan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan hidup dan meningkatkan kelangsungan hidup manusia yang ada di dalamnya. Secara umum kekayaan sumberdaya alam Indonesia berasal dari pertanian, perkebunan dan pertambangan. Sumberdaya alam pun dibedakan antara sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan yang tdiak dapat diperbaharui. Pertambangan adalah salah satu diantara sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui tetapi pengelolaan hasil tambang ini sangat memberikan mafaat besar bagi negara guna meningkatkan devisa negara. Peningkatan devisa negara dengan sendirinya juga akan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya

Di Maluku ada beberapa lokasi penambangan yang sudah beroperasi dan sudah beberapa tahun belakangan ini Maluku menjadi sangat heboh dan menjadi sorotan berbagai kalangan dengan rencana pengoperasian penambangan Migas Blok Masela yang ada di wilayah pemerintahan Propinsi Maluku khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sampai dengan hari ini, secara riil perusahaan tersebut belum beroperasi. Berbagai tahapan persiapan ke arah itu masih dibenahi dan ditingkatkan baik oleh pemerintah pust maupun pemerintah daerah termasuk di dalamnya berbagai regulasi yang mesti ditetapkan untuk memberi arah bagi pengoperasiaan penambangan Migas Blok Masela tersebut. Sekalipun secara resmi perusahaan tambang migas ini belum beroperasi namun persiapan ke arah itu sudah turut memberi pengaruh bagi masyarakat baik yang bersentuhan secara langsung maupun yang akan mengalami imbasnya juga. Lazimnya, suatu daerah tempat beroperasinya

¹ <https://rimbakita.com/sumber-daya-alam/>

penambangan akan merasakan dampak positif dan negatif bagi masyarakat dan juga lingkungan di sekitarnya. Munculnya dampak positif dan negatif dalam penambangan akan terlihat baik pada saat eksplorasi, eksploitasi juga pemrosesan dan penjualan hasil tambang serta pasca tambang.

Di Maluku akan hadir penambangan Migas Blok Masela yang berada secara khusus pada wilayah Kepulauan Tanimbar. Gubernur Maluku lewat SK Gubernur No 96/2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan Kilang Gas Alam Cair (LNG) Lapangan Abadi di Pulau Nustual Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar². Tentu saja hadirnya pertambangan Migas Blok Masela ini akan berdampak bagi masyarakat di sekitar Desa Lermatang tetapi juga desa-desa di sekitarnya bahkan di Saumlaki sebagai pusat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saat ini pertambangan Migas Blok Masela itu belum beroperasi namun masyarakat dan semua perangkat yang ada di dalamnya perlu dipersiapkan menghadapi masa itu. Berbagai pengalaman yang terjadi di tempat-tempat beroperasi perusahaan tambang telah menunjukkan bahwa setelah beroperasinya perusahaan tambang di daerah itu masyarakat mengalami banyak selaki dampak, baik yang negatif maupun positif. Ada beberapa penelitian yang dapat dirujuk, yang menunjukkan dampak dari beroperasinya perusahaan tambang di berbagai wilayah di Indonesia seperti yang dilakukan Teuku Ade Fahlevi dkk³

Pengalaman itu lalu menjadi catatan bahwa saat ini masyarakat di Desa Lermatang perlu dipersiapkan untuk menyambut masa beroperasinya pertambangan Migas tersebut. Guna mempersiapkan masyarakat dan mengambil langkah-langkah pendampingan bagi masyarakat yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, maka dirasa perlu untuk melakukan riset khusus untuk mengetahui kondisi masyarakat saat ini dan berbagai perubahan yang sudah terjadi di dalamnya sehingga tidak antisipatif dan upaya pendampingan bagi masyarakat bahkan lingkungan alam di sekitarnyaapun dapat teratasi. Kepentingan itulah yang mendorong tim peneliti untuk melakukan riset yang sifatnya antisipatif ini.

Informasi awal yang peneliti dapatkan dari lokasi penelitian menggambarkan beberapa realitas yang kemudian butuh ditelusuri lebih dalam melalui riset ini. di Lermatang, masyarakat atau warga jemaat telah terlibat dalam aksi jual beli tanah. Dari informasi yang diterima, aksi jual beli tanah ini sudah terjadi sejak tahun 2018 samapi dengan

² <https://mediaindonesia.com/ekonomi/317460/sk-lokasi-pelabuhan-blok-masela-diterbitkan>

³ Teuku Ade Farlevi, et al., *Dampak dan evaluasi kebijakan pertambangan batu bara di Kecamatan Mereubo*, Jurnal risalah Kebijakan pertanian dan lingkungan, Vol 2 No 2 Agustus 2015; Jimmy N, et al, *Dampak pertambangan batubara dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat di desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan*, Jurnal Ilmu administrasi negara Vol 8 No 2 November 2020; Reni Fitriyanti, *Pertambangan Batu Bara: Dampak Lingkungan, sosial dan ekonomi*, Jurnal redoks, Vol1 No 1, Januari 2016

saat ini. artinya bahwa penjualan tanah ini sudah terjadi jauh sebelum masyarakat mengetahui bahwa wilayah domisili mereka akan dijadikan lokasi pelabuhan kilang gas alam cair. Setelah memperoleh pengetahuan tentang hal itu, aksi jual beli tanahpun semakin marak terjadi. Sejak tahun 2019, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan proses edukasi terhadap masyarakat terkait penjualan tanah namun masyarakat masih melakukannya sampai saat ini. dari data yang diperoleh, Harga penjualan tanah per m² adalah Rp.7.000-10.000/m². Harga ini relatif sangat murah namun masih disertai pemotongan biaya yang katanya akan diberikan kepada desa.⁴ Masih terkait dengan masalah tanah, masyarakat terlibat dalam konflik batas tanah. Masing-masing pihak, yakni masyarakat yang wilayahnya berbatasan langsung dengan desa/Jemaat Lermatang yaitu desa Bomaki dan Latdalam. Konflik terjadi besar-besaran dan menimbulkan korban. Bahkan sampai sekarang proses hukum terhadap penetapan batas wilayah dan hak kepemilikan masih terus terjadi. Diduga, kehadiran penambangan Blok Masela menjadi faktor utama yang memicunya. Masyarakat/Jemaat Lermatangpun disebut oleh informan sebagai masyarakat yang konsumtif. Hasil penjualan tanah dipakai untuk membeli barang-barang mewah seperti mobil dan motor namun kemudian mengalami kendala dalam pengoperasiannya. Data lain menunjukkan bahwa masyarakat Lermatang yang dulunya dianggap etrisolasi kini sudah menjadi sangat terbuka sehingga interaksi sosial dengan masyarakat luar lebih baik, rumah penduduknya sudah lebih bagus dari sebelumnya. Gambaran awal ini menjadi bukti bahwa sesungguhnya sudah nampak dampak yang dirasakan masyarakat. Gambaran ini juga sekaligus menjadi titik berangkat bagi peneliti untuk melakukan kajian lanjutan terkait dampak yang timbul akibat akan beroperasinya pertambangan migas Blok Masela.

Penelitian ini akan dilakukan di Kalsis GPM Tanimbar Selatan dan lokasi penelitian khusus akan diarahkan pada Jemaat GPM Lermatang. Jemaat ini berada pada wilayah pemerintahan Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Lokasi utama penelitian ini ditetapkan dengan mengacu dari SK Gubernur Maluku yang menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan Kilang Gas Alam Cair (LNG) Lapangan Abadi di Pulau Nustual Desa Lermatang

⁴ Hasil wawancara jarak jauh dengan Pdt. J.L.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang digambarkan di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana sikap masyarakat menjelang beroperasinya penambangan Migas Blok Masela
2. Apa dampak akan beroperasinya penambangan Migas Blok Masela bagi masyarakat
3. Bagaimana bentuk perubahan yang terjadi di masyarakat menjelang beroperasinya penambangan Migas Blok Masela
4. Bagaimana peran Gereja dalam menyiapkan umat menyambut beroperasinya penambangan Migas Blok Masela

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Menganalisis sikap masyarakat menjelang beroperasinya penambangan Migas Blok Masela
2. Menganalisis dampak beroperasinya penambangan migas Blok Masela
3. Menganalisis bentuk perubahan yang terjadi di masyarakat menjelang beroperasinya penambangan Migas Blok Masela
4. Menjelaskan peran Gereja menyiapkan umat menyambut beroperasinya penambangan Migas Blok Masela

1.3.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat agar dapat

1. Menjadi salah satu referensi dan sumber pengetahuan tentang dampak akan beroperasinya suatu perusahaan tambang bagi masyarakat di Jemaat GPM/desa Lermatang
2. Menyiapkan sumber daya manusianya menyambut beroperasinya penambangan Migas Blok Masela tetapi juga memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia serta mengupayakan tindakan antisipatif terhadap dampak negatif yang akan terjadi pada waktunya.

3. Penelitian ini juga menjadi sumber informasi bagi Gereja, pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam menyiapkan umat/masyarakat serta lingkungan sekitarnya yang akan merasakan dampak langsung dari akan beroperasinya penambangan Migas Blok Masela ini baik dari sisi SDM, SDA serta yang lainnya.

1.4.Urgensi Penelitian

Penelitian ini dirasa penting sebab dalam banyak kasus di daerah-daerah tempat beroperasinya penambangan, menunjukkan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat tetapi juga lingkungan. Penelitian yang dilakukan di Jemaat GPM Lermatang ini sesungguhnya merupakan bagian dari penelitian antisipatif sehingga masyarakat dan lingkungannya sudah dipersiapkan dengan matang menjelang beroperasinya penambangan di daerah itu. Di samping itu, penelitian ini juga akan mendorong peran dan partisipasi politik warga GPM di wilayah-wilayah penambangan termasuk di dalamnya wilayah Lermatang dan sekitarnya yang akan menjadi wilayah penambangan.

1.5.Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

1.5.1. Kajian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait dengan beroperasinya perusahaan tambang di suatu lokasi, umumnya hanya dilakukan setelah beroperasinya proses pertambangan di wilayah/lokasi pertambangan itu. Riset khusus terkait dengan akan beroperasinya suatu perusahaan tambang tidak dijumpai. Karenanya peneliti tidak dapat menunjukkan kajian riset sebelumnya yang menelisik tentang akan beroperasinya perusahaan tambang namun peneliti akan mencoba memaparkan saja beberapa hasil riset terkait dengan dampak beroperasi pertambangan.

Reno Fitriyanti⁵ pernah melakukan penelitian terkait Dampak Pertambangan batubara : dampak lingkungan sosial dan ekonomi. Dari hasil penelitian itu, Fitriyani menunjukkan bahwa pertambangan batubara telah memberi dampak pada lingkungan, sosial dan ekonomi. 3 hal ini yang memang menjadi fokus penelitiannya. Dari hasil penelitian itu ditunjukkan bahwa pertambangan batu bara memberikan dampak negatif bagi lingkungan dimana telah terjadi lubang-lubang bekas operasi penambangan, terjadi penurunan kuantitas dan kualitas air. Dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat adalah adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, terjadinya

⁵ Reni Fitriyanti, *Pertambangan Batu Bara: Dampak Lingkungan, sosial dan ekonomi*, Jurnal redoks, Vol1 No 1, Januari 2016, h. 34-40

perubahan pola pikir masyarakat peningkatan pengetahuan dan teknologi dan terjadinya perubahan struktur sosial masyarakat. Sedangkan dampak ekonomi yang timbul adalah terjadi peningkatan ekonomi regional dan nasional, adanya peluang usaha pendukung, pembangunan infrastruktur baru, terbukanya isolasi daerah terpencil, terbukanya kesempatan kerja.

Jimmy N dkk juga melakukan penelitian tentang dampak pertambangan batubara dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat di desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Hasil risetnya menunjukkan bahwa terdapat dampak positif terhadap sosial ekonomi masyarakat Desa Apung mencakup tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, meningkatkan ekonomi masyarakat lokal dengan cara memberikan bantuan: (1) budidaya ayam dan ikan lele, (2) memberikan bibit jeruk kepada masyarakat petani (3) memberikan bibit singkong gaja, (4) memberikan bantuan air bersih (penampung air), (5) memberikan bantuan sosial berupa sembako, (6) membangun infrastruktur berupa jalan dan infrastruktur, berupa perbaikan badan jalan desa, membuat jalan antara desa dan membangun lapangan olahraga, (7) memberikan bantuan pada kerja bakti/umum di desa Apung. Dampak positif selanjutnya yaitu meningkat usaha masyarakat lokal yaitu usaha sembako terus melonjak naik dan toko/atau jualan, meningkatkan usaha depo air, dan membuka usaha ketring. Dampak negatif adanya perusahaan pertambangan yaitu, penebangan hutan, hilangnya flora dan fauna, lahan untuk kegiatan pertanian berkurang, pencemaran terhadap beberapa aliran air, debu atau polusi udara, dan terjadinya sengketa lahan antara masyarakat⁶.

Hasil riset yang dipaparkan di atas dengan jelas menunjukkan bahwa riset-riset tersebut berbeda dengan riset yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini. walaupun penelitian yang disebutkan di atas menganalisis juga tentang dampak hadirnya perusahaan tambang pada wilayah riset itu tetapi penelitian ini lebih mengarah pada dampak akan beroperasinya perusahaan tambang migas Blok Masela dan itu menunjukkan perberdaan riset kami dengan riset-riset sebelumnya.

⁶ Jimmy N, et al, *Dampak pertambangan batubara dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat di desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan*, Jurnal Ilmu administrasi negara Vol 8 No 2 November 2020, h.111-121

1.5.2. Landasan Teori

a. Perubahan sosial masyarakat sebagai dampak beroperasinya Pertambangan

Manusia dalam perkembangan hidupnya selalu mengalami dinamika perkembangan dari waktu ke waktu. Manusia akan selalu berjuang dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengupayakan agar hidupnya selalu 'survive'. Dalam usaha untuk tetap survive itulah maka manusia akan beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Proses adaptasi dengan lingkungan tidak hanya terjadi ketika manusia mengalami perpindahan dari suatu lokasi tempat tinggal ke lokasi tempat tinggal yang lain. Proses adaptasi itu bisa juga terjadi di tempat yang sama ketika manusia mengalami perjumpaan dengan orang lain yang berasal dari tempat dan budaya yang lain yang akan turut memengaruhi kehidupannya. Perubahan tersebut juga bisa terjadi ketika terjadi pembangunan di suatu wilayah tertentu juga ketika dibukanya suatu wilayah penambangan. Dibukanya suatu wilayah penambangan akan memungkinkan terjadinya perjumpaan antara masyarakat setempat dengan orang lain yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penambangan yang terjadi di daerah itu. Baik perjumpaan dengan orang lain maupun pembukaan wilayah penambangan itu turut memberi warna terhadap dinamika perkembangan atau perubahan sosial masyarakat di wilayah tersebut, baik itu dari sisi kebudayaan maupun masyarakat itu sendiri. J.L.Gillin dan J.P.Gillin dalam Leibo merumuskan perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat⁷. Pengertian di atas menunjukkan bahwa terjadinya perubahan sosial karena dinamika yang terjadi di masyarakat dan reaksinya terhadap lingkungan sosial. Perubahan yang terkait dengan cara hidup, kondisi alam, cara manusia berkebudayaan, dinamika kependudukan maupun filsafat hidup yang dianut. Di situlah manusia menemukan hal baru dalam dan membuat perubahan dalam hidupnya.

Farley dalam Sztompka juga mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan kepada pola perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu. Artinya bahwa perubahan yang terjadi di dalam masyarakat terjadi karena adanya perubahan interaksi dalam masyarakat ketika masyarakat tersebut melakukan tindakan di dalam masyarakat itu sendiri⁸. Sumber perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat bersala dari dalam dan dari luar masyarakat itu sendiri. Bentuk perubahan dari dalam terdiri dari

⁷ Leibo, Jefta. 1986. *Sosiologi Pedesaan: Desa Kita Sebuah Potret Perubahan dalam Kesenambungan, Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma* Ganda. Jakarta: Andi Offset, h.53.

⁸ Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*. Terjemahannya dari Judul Asli *The Sociology Of Social Change* (1993). Jakarta: Prenada Media, h 5

dinamika penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, pemberontakan dalam masyarakat, ketegangan internal yang muncul di bawah tekanan. Perubahan yang berasal dari luar berkaitan dengan kemajuan teknologi.

Dimensi perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat terbagi atas tiga yaitu

1. Dimensi perubahan sosial pada struktur. Pada dimensi ini, perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak sisi dan bukan hanya satu sisi saja. Misalnya di daerah pertanian, masuknya traktor mengubah peran perempuan atau buruh tani yang berperan aktif dalam pertanian karena telah diganti dengan mesin yang mengatur pelaksanaan pertanian. Telah terjadi perubahan sosial akibat masuknya teknologi yang mengubah dimensi struktural.
2. Dimensi perubahan sosial pada budaya. Hal ini biasanya terjadi karena adanya modernisasi atau penemuan baru yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat
3. Dimensi perubahan sosial pada interaksional. Interaksi antar sesama manusia menjadi berkurang akibat peran manusia yang tergantikan dengan teknologi dalam aktifitas keseharian. Hubungan sosial manusia menjadi terbatas sehingga memungkinkan timbulnya konflik di dalam masyarakat.

Agen dari perubahan sosial menurut Sztompka adalah aktor individu, agen kolektif, kelompok tugas, gerakan sosial, asosiasi, partai, tentara, pemerintah dan sebagainya⁹. Yang berperan sebagai aktor individu adalah orang biasa tetapi bisa juga individu yang karena kualitas pribadinya yang khas bertindak mewakili orang lain, atas nama kepentingan mereka. Dalam perubahan sosial memang diakui bahwa peran individu sangat kecil namun jika peran itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan dan menyebabkan perubahan sosial maka hal itu mesti dilihat sebagai hasil yang dikehendaki oleh gabungan individu.

Perubahan sosial masyarakat dapat terjadi sebagai dampak dari beroperasinya suatu pertambangan. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas baik yang bersifat alamiah, kimia, fisik maupun biologi yang mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat disekitarnya¹⁰ Menurut Soerjono¹¹ industri pertambangan juga berpotensi merusak lingkungan sosial, yaitu nilai-nilai sosial budaya lokal dan ekonomi masyarakat yang bermukim di wilayah tambang, mempengaruhi pola kepemilikan lahan, pemanfaatan dan penguasaan sumberdaya alam, pertumbuhan dan perkembangan fasilitas sosial yang pada gilirannya menurunkan tingkat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

⁹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta, Prenada, 1993, h.305

¹⁰ Otto, Soemarwoto. 2009. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

¹¹ Soerjono, Soekanto. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dampak adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ atau kegiatan, Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan bahwa setiap kegiatan yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, perlu disertai dengan dasar pertimbangan yaitu bahwa penilaian pentingnya dampak terhadap lingkungan atas dasar kemungkinan timbulnya dampak positif atau negatif tidak boleh dipandang sebagai faktor yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan harus diperhitungkan bobotnya guna dipertimbangkan hubungan timbal baliknya untuk mengambil keputusan (Fatmawati;Budiman;Dyastari 2017)¹².

Konsep ini menjadi penting untuk membantu peneliti melakukan riset guna menganalisis dampak yang terjadi di Lerematang terkait dengan akan beroperasinya pertambangan Migas Blok Masela

b. Kebijakan Publik dan Pembangunan Masyarakat

Kebijakan publik dan implementasinya menunjukkan potret dari suatu Negara dan rakyat. Kebijakan publik hakikatnya adalah untuk membangun rakyat, sehingga rakyat dapat bekerja dan mengalami kemajuan luar biasa. Hal ini terkait erat dengan tugas manajemen yaitu untuk mengembangkan manusia, sehingga orang-orang dapat bekerja dengan cara luar biasa (Drucker, dalam Nugroho¹³. Implementasi kebijakan publik tidak lain adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang menjadi prioritas, dalam keputusan-keputusan kebijakan (Meter dan Horn, 1975).

Nugroho¹⁴ menyebut bahwa terdapat dua penyebab kegagalan pemerintah membangun kebijakan publik yang hebat dan unggul. *Pertama*, karena tidak mengerti makna dan substansi kebijakan publik. *Kedua*, karena tidak ada analisis kebijakan publik, atau walaupun ada tetapi tidak bekerja dengan baik sehingga tidak mampu menghasilkan suatu kebijakan yang hebat. Samuel Huntington menyatakan dalam bukunya *Political Order in the Changing Society* bahwa di negara-negara baru, partisipasi politik cenderung berkembang dengan pesat sehingga system politik tidak dapat mewadahnya. Hal ini mengakibatkan “pembusukan politik”. Dalam kondisi seperti ini tidak mungkin pembangunan dilaksanakan. Dalam kaitan

¹² Fatmawati;Budiman;Dyastari, Letizia. 2017. “Dampak Lingkungan Galian Tambang Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.” 6(2):553–566.

¹³ NugrohoRian. 2018. *Public Policy* (edisirevisi). Jakarta: Elex Media Komputindo, h.3.

¹⁴ NugrohoRian. 2018. *Public Policy* (edisirevisi). Jakarta: Elex Media Komputindo.

ini Huntington menawarkan solusi adalah menegakan tertib politik, dan dalam kondisi tertentu diperlukan penekanan terhadap partisipasi politik. Pemikiran Huntington diterapkan pada sejumlah Negara termasuk Indonesia dalam rangka memastikan seperti apa pembangunan berjalan dan Negara tetap memiliki posisi kuat.

Mengapa Negara atau pemerintah sebagai pembangun kebijakan harus kuat? Negara membentuk lingkungan atau iklim yang membangun daya saing setiap aktor di dalamnya. Iklim itu diciptakan melalui kebijakan publik yang memberdayakan setiap organisasi didalam negara (Michael Porter, 1998). Rian Nugroho menyimpulkan bahwa saat ini pemikiran tentang memperkuat Negara perlu diletakkan pada skema *win-win*. Dalam pengertian bahwa memperkuat Negara bukan berarti melemahkan masyarakat (*civil society*). Alasannya adalah baik Negara maupun masyarakat (*civil society*), keduanya harus sama-sama kuat sebagai pilar bersama pembangunan demokrasi yang konsolidatif. Dalam kaitan ini maka perlu meningkatkan kapasitas Negara untuk membangun kebijakan publik yang unggul¹⁵

Nogroho, yang mengacu dari pemikiran Michael Porter, Boon Siong Neo dan Geraldine Chan¹⁶ mengaskan pentingnya memperkuat negara sebagai keharusan agar dapat merespon aspirasi yang berakselerasi sebagai bagian penting dari penguatan masyarakat. Memperkuat Negara bukan berarti menambah BUMN dan meningkatkan intervensi ke pasar, karena hal ini berarti melemahkan pasar. MemperkuatnNegara adalah membangun negara yang bias menjaga, mengembangkan pasar beserta mekanismenya yang alami (Nogroho, 2018:63-64).

1.6. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan karena penelitian ini dilakukan untuk memahami konteks masyarakat di Lermmatang sebagai desa yang menjadi pusat pengoperasian penambangan migas Blok Masela. Peneliti akan beruaha memahami pemahaman masyarakat serta menganalisis berbagai dampak yang terjadi di sana sebagai akibat akan beroperasinya penambangan migas. Dalam kaitan denga itu maka beberapa langkah yang perlu diperhatikan yaitu :

1.6.1. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah pengamatan terlibat atau partisipasi (*Participant observatoin*), wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan studi

¹⁵ Nugroho Rian, 2018, h.62.

¹⁶ Boon Siong Neo dan Geraldine Chan. 2009.*Dynamic Governance*. Singapore: Times.

pustaka. *Participant observatoin* saya gunakan untuk memperoleh data mengenai aktivitas harian komunitas masyarakat Lermatang. Peneliti akan mengamati reaksi sosial yang terjadi di masyarakat, mengamati berbagai dampak yang terjadi di masyarakat serta mengamati aktivitas masyarakat menyambut beroperasinya penambangan migas Blok Masela.

In-depth interview dilakukan terutama untuk memperoleh pandangan, pemahaman dan evaluasi terhadap rencana beroperasinya penambangan migas Blok Masela. Wawancara akan dilakukan secara formal dan non formal dengan sejumlah informan dan informan kunci. Wawancara akan dilakukan dengan beracu dari daftar pertanyaan yang akan dibuat sebelum ke lokasi penelitian, tetapi pertanyaan-pertanyaan akan dikembangkan dalam setiap percakapan formal maupun non formal dengan informan. Wawancara mendalam akan dilakukan untuk melakukan konfirmasi guna mengetahui bagaimana kesiapan masyarakat menyambutnya hadirnya penambangan migas, bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kehadiran tambang migas dan pengaruhnya bagi masyarakat, bagaimana kesiapan masyarakat menyambut berooperasi tambang migas, bagaimana partisipasi masyarakat terhadap kesiapan pengoperasian penambangan migas ini. *In depth interview* dirasakan memang memiliki keterbatasan karena dengannya tidak mewakili semua masyarakat di Lermatang tetapi peneliti akan menentukan klasifikaisai informan yang akan diwawancarai sehingga dapat mewakili semua unsur di dalam masyarakat. Terkait dengan kesiapan masyarakat dan dampak yang akan dirasakan, peneliti juga melakukan konfirmasi dengan informan lain di luar desa Lermatang seperti desa Bomaki dan Latdalam yang beririsan dengan desa Lermatang dan juga ki kota Saumlaki sebagai pusat pemerintahan Kabupaten dan pusat Klasis (Gereja).

Studi kepustakaan berguna untuk menyusun landasan teori yang akan menjadi tolak ukur unuk menganalisa data penelitian lapangan guna menjawab persoalan penelitian.

Semua data yang diperoleh baik di lapangan maupun lewat kajian pustaka akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis interpretatif untuk memahami gejala yang diteliti. Proses analisis ini akan dilakukan sejak masih berada di lokasi penelitian maupun setelah kembali dari lokasi penelitian.

1.6.2. Informan

Subyek dari penelitian kualitatif adalah informan dan informan kunci. Informan dipilih dengan kriteria tertentu untuk mewakili tua-tua adat, pemerintah negeri, masyarakat, tokoh agama. Masyarakat yang diilih tidak hanya yang berada dan berdiam di desa Lermatang tetapi juga di Bomaki, Latdalam dan kota Saumlaki guna melakukan konfirmasi karena

mereka juga adalah pihak-pihak yang akan turut merasakan dampak dari beroperasinya penambangan Migas Blok Masela. Di antara para informan yang ditentukan itu, ada informan kunci yang akan dipilih guna melakukan wawancara mendalam dengan mereka.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran umum lokasi penelitian menjadi penting untuk digambarkan di sini sebagai data awal untuk membantu dalam melakukan analisa pada bab berikutnya terkait dengan hasil temuan dalam penelitian. Pendekatan yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah Jemaat karena alasan karena kami ingin melihat sejauh mana peran Gereja terhadap kondisi yang terjadi di lokasi penelitian terkait dengan persoalan akan beroperasinya perusahaan tambang di sana. Karena itu, data yang kami paparkan di sini adalah data jemaat/ disadari sungguh bahwa Jemaat GPM Lermatang berada di dalam wilayah desa Lermatang namun kami sendiri mengalami kesulitan dalam mendapatkan data desa. Hal ini disebabkan karena adanya konflik internal yang terjadi di dalam desa pasca pelantikan kepala desa yang baru. Ada pro kontra di masyarakat yang berimbas pada perusakan beberapa aset desa di kantor desa dan tidak adanya data apapun yang tersedia di desa. Kami sudah melakukan konfirmasi dengan kepala desa yang baru bersama dengan sekretaris desa, namun mereka mengakui bahwa mereka tidak memiliki data apapun karena tidak tersedia di kantor desa dan tidak ada serahterima semua aset desa kepada pemerintahan yang baru. Dengan demikian maka gambaran umum lokasi penelitian tidak bisa kami gambarkan secara detail dari sisi wilayah pemerintahan desa tetapi dari sisi wilayah pelayanan Gereja. sumber data yang kami gunakan adalah dari Renstra Jemaat GPM Lermatang tahun 2021

II.1. Kondisi Geografis

2.1. Kondisi Umum Wilayah dan Keadaan Pelayanan Jemaat GPM Lermatang

2.1.1. Kondisi Umum Wilayah Pelayanan Jemaat.

Jemaat GPM Lermatang adalah salah satu jemaat di Klasis Tanimbar selatan yang secara historis merupakan jemaat tertua di kepulauan Tanimbar pada Tahun 1824. Namun disayangkan, dinamika sejarah keberadaan Injil sampai kepada perjuangan mempertahankan GPM di tanah Lermatang sulit ditelusuri karena tidak adanya dokumen sejarah yang tertulis

secara resmi. Catatan sejarah yang didapatkan dari wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap mengetahui sejarah bahkan pelaku sejarahpun masih mengalami perbedaan data yang simpang- siur.

Secara garis besar, sejarah jemaat GPM Lermatang dimulai dari masuknya injil di Lermatang pada tahun 1824 yang dibawa oleh *Yoseph Kam* bersama Guru jemaat *LUHULIMA*. Penginjilan mengalami kemajuan sampai pada Tahun 1905, awal masuknya pendidikan Kristen di Lermatang oleh seorang guru jemaat (Penginjil) yang bernama *Bapak J.NOYA*. Masyarakat Lermatang pun bertumbuh Sebagai satu-satunya gereja yang misioner dalam menata kehidupan spiritual iman Kristiani dari masa ke masa.

Seiring perjalanan waktu dinamika pertumbuhan injil pun mengalami pergolakan yang cukup signifikan pada Tahun 1973, yakni perpecahan GPM, ke dalam GKPII (Gereja Kristen Injili Indonesia). Sejarah menceritakan bahwa tragedi perpecahan ini memberi dampak bagi perkembangan GPM di Lermatang. Dimana adanya pembatasan ruang gerak pelayanan GPM yang menjadi kelompok minoritas saat tragedi tersebut. Dalam kondisi demikian, maka dengan anggota jemaat GPM yang hanya tersisa 5 (lima) KK kegiatan peribadahnya hanya bisa dilakukan pada rumah dinas guru yang ditempati *kepala SD Kristen Bapak J Sambonu*. Namun kemudian kegiatan peribadahan ini pun dilarang oleh pemerintah desa dengan alasan bahwa rumah tersebut adalah rumah dinas. Tempat ibadah akhirnya dipindahkan ke rumah keluarga bapak Samuel Lamere.

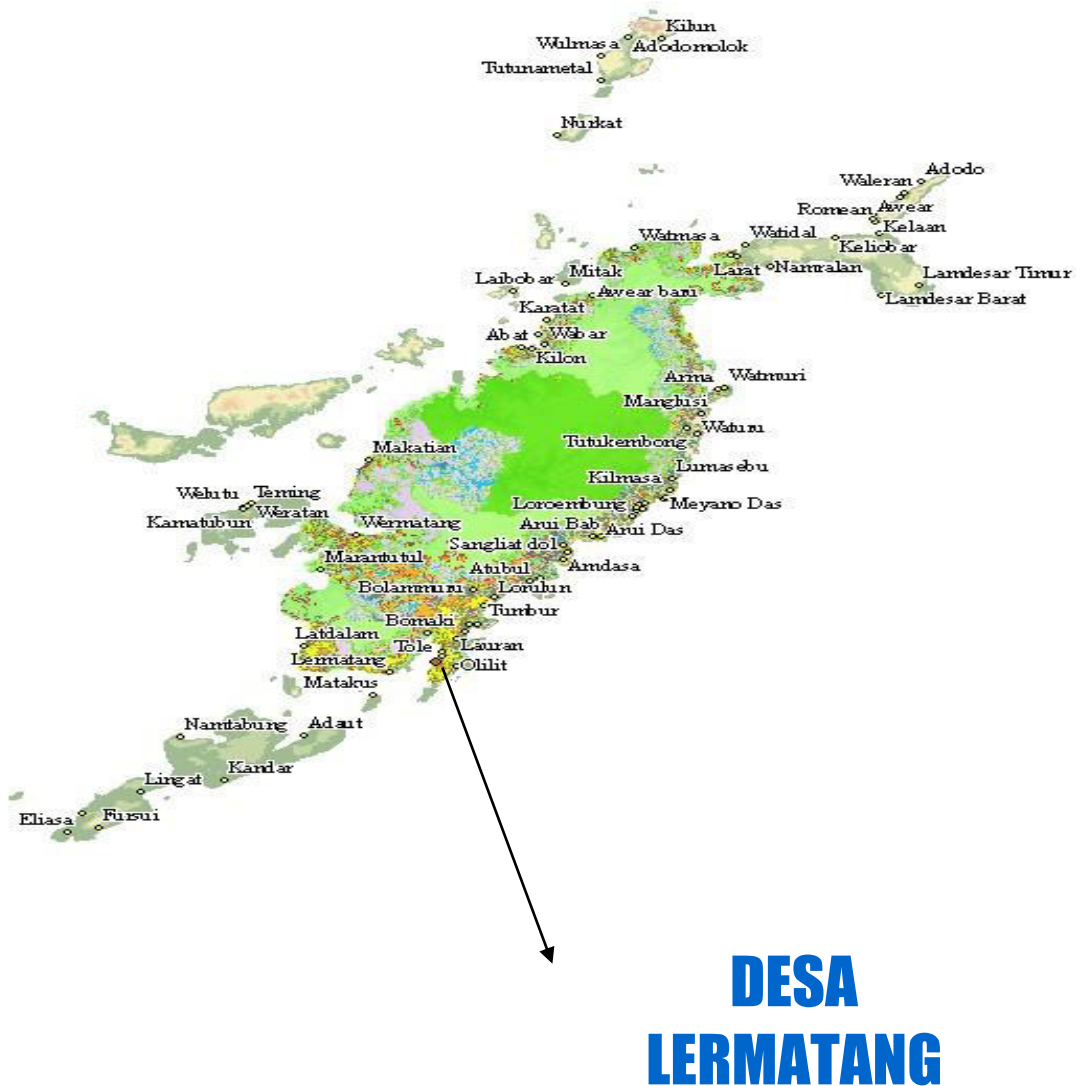
Dalam perjalanan panjang yang dimulai dari *5 (lima) KK dengan jumlah 18 orang*) maka pertumbuhan umat yang tertatih- tatih ini membutuhkan suatu tempat ibadah yang layak. Umat yang hanya 5 KK ini membangun tempat ibadah darurat diperbatasan kampung di ketinggian dan masih belum dihuni saat itu, dan sekarang merupakan lokasi Gereja Bethel baru. Atas dasar inilah dibentuk panitia pembangunan gereja baru dan peletakan batu penjurur pada tanggal 31 Juni 1994 dalam ibadah yang dipimpin oleh *Pdt.St.Sedubun, STh*. Sedangkan pendirian tiang bermula pada bulan November 1995 dalam ibadah Minggu yang dipimpin oleh *Pdt.W. Pariama. STh*. Proses pembangunan ini beberapa kali mengalami perubahan karena dirasa bentuk dan struktur bangunan gereja tidak baik. Penantian yang panjang kira-kira 17-an tahun akan suatu gedung gereja akhirnya terwujud pada *hari Rabu , 14 Desember 2011* ketika diresmikannya gedung *gereja baru Bethel* oleh *Pdt.W.Pariama STh*, selaku Wakil Sekum MPH Sinode diatas tanah seluas 45x50 meter

Dinamika pelayanan GPM di jemaat Lermatang tidak hanya sebatas itu saja ,ada pula kisah perjalanan pelayanan pahit dari beberapa pelayan yang melayani di jemaat GPM

Lermatang. Akhir-akhir ini pula kerukunan bermasyarakat dan bergereja yang sudah terbentuk antara GPM dan GKPII di Lermatang kembali digoyahkan dengan kehadiran *GSJA*. Namun juga beralihnya *Warga gereja GKPII ke GPM gerja Asal*.

a. **Keadaan Geografis dan Batas Wilayah pelayanan Jemaat (ditambah Sketsa Map/peta Jemaat)**

Gambar Letak Desa Lermatang – Kecamatan Tanimbar Selatan



Dari aspek Geografis sistim administrasi pelayanan GPM jemaat Lermatang memiliki batas-batas wilayah pelayanan sebagai berikut :

- **Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bomaki**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Matakus**

- **Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Latdalam**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan Saumlaki dan Olilit Baru**

Jemaat GPM Lermatang berada dalam Wilayah Desa Lermatang dengan luas wilayah yang diduduki oleh penduduk dari Timur- Barat 3 Km dan Utara – Selatan 3,5 Km, belum termasuk dengan wilayah petuanan Lermatang. Desa Lermatang secara Administratif termasuk dalam Wilayah Kecamatan Tanimbar Selatan yang terletak dipulau Yamdena Timur.

Jarak untuk mencapai Kabupaten dari pusat Klasis kira-kira 1 jam perjalanan dengan transportasi darat dan ½ jam perjalanan dengan transportasi laut.

a. Keadaan Topografi dan Orbitasi Jemaat.

1) Topografi

Di utara pulau Yamdena terdapat sederetan pulau-pulau kecil. Deretan pulau-pulau tersebut terpisah oleh selat yang dangkal dengan kedalaman tidak lebih dari 20 meter, sehingga apabila terjadi pasang surut terbentuk dataran kering yang luasnya bisa mencapai setengah kilometer dari tepi pantai Yamdena. Yamdena Utara umumnya datar dengan ketinggian kurang dari 50 meter, sedang daerah perbukitan di bagian selatan tertinggi melebihi 200 meter.

Secara keseluruhan morfologi di daerah ini dapat dibedakan menjadi tiga satuan morfologi yaitu perbukitan, dataran rendah, dan teras/undak. Daerah perbukitan seperti yang terdapat di pulau Labobar dengan puncak tertinggi mencapai lebih dari 300 meter di atas permukaan laut.

Di pulau Yamdena bagian tenggara terdapat perbukitan bergelombang dengan ketinggian mencapai 260 meter. Dataran Rendah mengikuti aliran sungai. Dataran rendah terpanjang terdapat di sepanjang sungai Ranarmoje.

Undak batu gamping terdapat di sejumlah pulau kecil seperti pulau Selaru, Larat dan Fordata. Undak tersebut dibatasi lereng terjal tetapi puncaknya hampir datar dengan puncak tertinggi 104 meter.

2) Iklim

Iklim di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat dipengaruhi oleh sirkulasi angin musim yang bergerak dari dan ke arah ekuator. Sehingga, pola iklim di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah pola ekuatorial yang dicirikan oleh bentuk pola hujan yang bersifat bimodal (dua puncak hujan) yaitu pada bulan Desember/Januari dan April/Mei.

a) Musim

Selama periode April-September sirkulasi udara didominasi oleh angin pasat tenggara atau angin timuran dari Australia yang dingin dan relatif kering sehingga kurang mendatangkan hujan, terutama pada bulan Juli, Agustus, dan September.

Selama periode Oktober-Maret, angin pasat timur laut dari lautan pasifik dan Asia yang lembab dan panas bertiup secara dominan dan konvergen menuju ekuator kemudian berubah arah menjadi barat laut atau angin baratan menuju bagian selatan ekuator, diantaranya melewati laut Banda yang cukup luas. Angin tersebut banyak mengandung uap air yang tercurah sebagai hujan di wilayah Kepulauan Tanimbar. Sehingga curah hujan cukup tinggi terjadi pada bulan Desember, Januari, Februari dan Maret.

b) Curah Hujan

(1) Jumlah curah hujan selama tahun 2020 sesuai data dari Stasiun Meteorologi Saumlaki adalah 2027,1 mm, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei sebanyak 395,7 mm.

(2) Jumlah hari hujan selama tahun 2020 adalah 189 hari, dengan hari hujan terbanyak pada bulan Desember sebanyak 26 hari.

c) Suhu, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari

(1) Sesuai data dari Stasiun Meteorologi Saumlaki, suhu rata-rata terendah pada tahun 2020 adalah $26,4^{\circ}\text{C}$ yaitu pada bulan Juli, sedangkan suhu rata-rata tertinggi pada bulan November sebesar $29,7^{\circ}\text{C}$. Rata-rata kelembaban udara relatif tertinggi tahun 2020 terjadi pada bulan November mencapai 75 persen.

(2) Tekanan udara tertinggi pada tahun 2020 mencapai 1015,4 mb terjadi pada bulan Agustus dan durasi penyinaran matahari tertinggi terjadi pada bulan September mencapai 84 persen. Kecepatan angin tertinggi mencapai 28 knot terjadi pada bulan Pebruari.

d) Tipe Iklim

Berdasarkan peta zona Agroklimat Provinsi Maluku (LTA-72 1986) dan klasifikasi Oldeman (1980), gugus pulau Tanimbar termasuk dalam tiga zona agroklimat, yaitu:

(1) Zona II.3: curah hujan tahunan 1500-1800 mm, tercakup dalam zona D3 menurut Oldeman, dengan bulan basah 3-4 bulan dan bulan kering 4-6 bulan.

- (2) Zona II.4: curah hujan tahunan 1800-2100 mm, tercakup dalam zona C3 menurut Oldeman, dengan bulan basah 3-4 bulan dan bulan kering 4-6 bulan.
- (3) Zona IV.1: curah hujan tahunan 3000-4000 mm, tercakup dalam zona A3 menurut Oldeman, dengan bulan basah lebih dari 9 bulan dan bulan kering kurang dari 2 bulan.

2.1.2. Keadaan Pelayanan Jemaat GPM Lermatang

a. Jumlah KK dan Jiwa Jemaat (per Sektor dan Unit pelayanan, juga menyangkut data masyarakat)

Pada tahun 2021, hasil pendataan Majelis jemaat dengan jumlah jiwa Jemaat GPM Lermatang sebanyak 692 Jiwa dari 183 KK yang tersebar dalam 6 (enam) unit pelayanan Tahun 2020. Dapat diamati dalam tabel berikut :

Tabel. 2.1
Jumlah KK dan Jiwa Jemaat

No	Sektor	Unit	KK	Jumlah/Jenis Kelamin		
				Lk	Pr	Jiwa
1	Laharoi	Teberias	27	46	41	87
2	Laharoi	Bukit Zaitun	29	45	50	95
4	Sion	Kalvari	34	83	57	140
5	Sion	Maranatha	32	73	68	141
7	Getsemani	Mahanaim	35	69	60	129
8	Getsemani	Diaspora	26	50	50	100
Total			183	366	326	692

Tabel. 2.2
Kategori Usia

No.	Sektor	Unit	Kategori Usia																	
			0-3		04-Jun		07-Sep		10-Des		13-15		16-45		46-59		60-85		>86	
			Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	Laharoi	Teberias	6	5	3	9	-	-	2	-	5	-	25	24	5	3	-	-	-	-
		Bukit Zaitun	2	1	1	4	4	2	1	4	1	6	27	25	8	6	1	2		
2	Sion	Kalvari	7	1	3	2	6	5	6	6	8	5	37	25	11	11	5	2		
		Maranatha	4	5	5	4	4	6	2	4	7	1	31	35	7	6	13	7		
3	Getsemani	Mahanaim	1	4	2	2	4	1	3	3	5	7	39	36	8	4	7	3		
		Diaspora	5	1	1	2	3	4	2	2	2	5	29	30	4	4	4	2		
Jumlah			25	17	15	23	21	18	16	19	28	24	188	175	43	34	30	16	0	0

Pada tabel diatas menggambarkan keadaan keadaan umat sebagai berikut; jumlah KK 183, laki-laki 363 orang, perempuan 326 orang dengan perincian sebagai berikut: 0-3 tahun laki-laki 25 dan perempuan 17; 4-6 tahun laki-laki 15 orang dan perempuan 23 orang; 7-9 tahun. Laki-laki 21 orang dan perempuan 18 orang; 10-12. Laki-laki 16 orang dan perempuan 19; 13-15 tahun. Laki-laki 25 orang dan perempuan 24; 16-45 Tahun. Laki-laki 188 orang dan perempuan 175 orang; 46-59 Tahun. Laki-laki 43 orang dan perempuan 34 orang; 60-85 Tahun. Laki-laki 30 orang dan perempuan 16 orang.

b. Kategori Bina Umat

Kategori Bina Umat adalah jumlah tiap jenjang menurut sektor pada tahun 2021 terlihat pada table berikut:

No.	Sektor	Unit	Kelompok Bina Umat															
			Batita 2	Batita 3	AI1	AI 2	AI 3	AK1	AK2	AK3	AT1	AT2	AT3	Remaja	AMGPM	WPP	WPL	WGS
1	Laharoi	Teberias	11		12			-			2			5	49	3	5	-
		Bukit Zaitun	3		5			6			5			7	52	6	8	3
2	Sion	Kalvari	8		5			11			12			13	62	11	11	7
		Maranatha	9		9			10			6			8	66	6	7	20
3	Getsemani	Mahanaim	5		4			5			6			12	75	4	8	10
		Diaspora	6		3			7			4			7	59	4	4	6
Jumlah			42	0	38	0	0	39	0	0	35	0	0	52	363	34	43	46

Data kategori bina umat di jabarkan sebagai berikut.

- Kategori batita

Kategori Anak Remaja

- sektor laharoi : 13
 - sektor sion : 17
 - sektor Getsemani : 11
 - kategori anak indria
 - sektor laharoi : 17
 - sektor sion : 14
 - sektor Getsemani : 7
 - kategori anak kecil
 - sektor laharoi : 6
 - sektor sion : 21
 - sektor Getsemani : 12
 - kategori anak tanggung
 - sektor laharoi : 7 orang
 - sektor sion : 18
 - sektor Getsemani : 10 orang
 - kategori WPS
 - sektor Laharoi : 7
 - sektor Sion : 27
 - sektor Getsemani : 16
- sektor laharoi : 12
 - sektor sion : 21
 - sektor Getsemani : 19
- Kategori AMGPM
- sektor laharoi : 101
 - Sektor Sion : 108
 - Sektor Getsemani : 134
- Kategori WPP
- Sektor Laharoi : 58
 - Sektor Sion : 77
 - Sektor Getsemani : 74
- Kategori WPL
- Sektor Laharoi : 65
 - Sektor Sion : 86
 - Sektor Getsemani : 80

jumlah katagori Batita 41, AI. 38, AK. 39, AT.40, AR.52, AMGPM. 343, WPP. 209, WPL.231, dan WPS. 46

c. Keadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Data ini menggambarkan keadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tahun 2021. Diantaranya 1 tunarungu di bukit zaitun, 1 tuna daksa di diaspora, janda 6, duda 6 yatim piatu 5

No.	Sektor	Unit	Kondisi PMKS																							
			Tuna netra		Tuna Rungu		Tuna Grahita		Tuna Daksa		Autis		Down Syndrom		Tuna Ganda Majemuk		Stunting		Orang dalam gangguan jiwa (ODGJ)		Janda		Duda		Yatim/Piatu	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Laharoi	Teberias																								
2	Laharoi	Bukit Zaitun			1											1	1				1					
3	Jumlah Menurut Sektor				1										1	1				1						
4	Sion	Kalvari																				1		2	2	
5	Sion	Maranatha																								
6	Jumlah Menurut Sektor																					1		2	2	

7	Getsemani	Mahanaim																		1	3		2	1	
8	Getsemani	Diaspora						1													4	2		2	2
	Jumlah Menurut Sektor							1													5	5		4	3
	Jumlah				1			1								1	1				6	6		6	5

Data ini menggambarkan penyandang masalah kesejahteraan sosial, untuk sektor laharoi 1 untuk tunarungu, 2 satunting, janda 2. Sektor Sion duda 1, yatim piatu 3, dan sektor Getsemani tuna daksa 1, stanting 2, janda 5, duda 5, yatim piatu 7

d. Keadaan Sektor dan Unit Pelayanan

Keadan sektor dan unit pelayanan tahun 2020/2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

No.	Sektor	Unit	Jlh.KK	Jlh. Jiwa	Status Keanggotaan Gereja					
					Baptis		Sidi		Nikah	
					sudah	belum	sudah	Belum	sudah	belum
1	Laharoi	Teberias	27	67	82	6	88	2	106	
2	Laharoi	Bukit Zaitun	29	98	130	4	138	17	107	
3	Jumlah Menurut Sektor		56	156	212	10	226	19	213	-
4	Sion	Kalvari	34	149	101	4	98	10	117	4
5	Sion	Maranatha	32	142	125	5	119	12	126	39
6	Jumlah Menurut Sektor		66	291	226	9	217	22	243	43
7	Getsemani	Mahanaim	35	139	85	27	85	7	115	11
8	Getsemani	Diaspora	26	100	112	11	107	9	109	

	Jumlah Menurut Sektor	61	239	197	30	192	16	224	11
	Jumlah	183	692	635	49	635	57	680	54

Dengan demikian dari 692 jiwa pada Tiga sector pelayanan terdapat yang sudah baptis berjumlah : 635 dari 692 jiwa dan 49 orang yang belum baptis, Sedangkan bagi yang sudah Sidi adalah 635 orang dari 692 jiwa, dan 57 orang yang belum sidi, Untuk nikah 680 orang telah menikah dari 692 jiwa dan yang belum menikah 54 orang

d.1. Ketersediaan Pelayan Jemaat

Gambaran di sini bertujuan untuk mengetahui kondisi ketersediaan perangkat pelayanan, ketersebarannya dan juga dalam rangka pembinaan dan penguatan kapasitas pegawai/pelayan di Jemaat GPM Lermatang dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Sektor	Unit	Pelayan Khusus				Pegawai Non Pendeta		Perangkat Pelayan Gereja									
			Pdt/ Peningjil	Pnt	Dkn	Pdt/Penginjil domisili	Organik	Non Organik	Wadah SMTPI	PC AMGPM	PR AMGPM	Wadah Pelayanan Perempuan		Wadah Pelayanan laki-laki		Tuagama	Pembimbing Pengasuh	Tim Pengajar (<i>Team teaching</i>) Katekisasi
												Jemaat	Sektor	Jemaat	Sektor			
1	Laharoi	Teberias	-	1	1	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8	2	-	-
2	Laharoi	Bukit Zaitun	1	1	1	1			4		3	8	8	8	8	2		
3	Jumlah Menurut Sektor																	
4	Sion	Kalvari		1	1						1	8	8	8	8	1	1	

5	Sion	Maranatha		1	1				2		4	8	8	8	8	1		
6	Jumlah Menurut Sektor																	
7	Getsemani	Mahanaim		1	1					1	1	8	8	8	8	1	1	
8	Getsemani	Diaspora		1	1	1			1		6	8	8	8	8	1	2	
9	Jumlah Menurut Sektor																	
Jumlah			1	6	6	2			7	1	15	48	48	48	48	8	4	

Data keadaan pelayan Jemaat Lermatang tahun 2021, seperti berikut; Pdt. 1, Pnt. 6 , Dkn 6, wadah SMTPI 7, PC. 1, PR. 15, WPP. 48, WPL, 48; Tuagama 8 dan Pengasuh Pembimbing 4

d.2. Keadaan Pelayanan Peribadahan dan Musik Gereja

Bagian ini berisi gambaran untuk memperlihatkan keadaan dan kebutuhan pembinaan di bidang peribadahan dan musik gereja yang dilakukan di jemaat.

Jenjang	VG	PS	Musik Pendukung					Kolektan	Kantoria	Singers	Operator Multimedia
			Paduan Terompet	Paduan suling	Keyboard	Musik Tradisional	Kelompok Band				
Jemaat	2	6	-	-	1	-	-	-	5	-	1
Sektor	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unit	6	6						24			
Jumlah	11	15	-	-	1	-	-	24	5	-	1

Data Keadaan Pelayanan Peribadahan dan Musik Gereja terlihat sebagai berikut, jumlah VG 11, PS 15, Keyboard 1, Kolektan 24 dan multimedia 1

Keadaan Sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan budaya Jemaat

e.1. Keadaan Sosial Ekonomi

e.1.1. Pekerjaan pokok/mata pencaharian rumah tangga

Pada Jemaat Gpm Lermatang pekerjaan pokok dan atau mata pencaharian berorientasi kerja ganda petani/pekebun di musim tertentu, dan di musim lain menjadi nelayan/ pencari ikan- dan rata-rata untuk kepentingan sub sistem yakni hanya untuk makan sehari- hari dan atau kebutuhan sehari-hari. Karena itu dengan memperhatikan kebutuhan akan hidup sebagai kelompok pekerja sub sistem jemaat terpaksa membagi kebutuhannya sesuai dengan keadaan musim yakni dapat mempertahankan kehidupan mereka, sehingga mereka tidak hanya terfokus pada kebutuhan pencarian sebagai nelayan tradisional tetapi juga petani tradisional.

No	Jenjang	Pekerjaan Pokok																						
		Tidak	Belum	PNS	Peg.	TNI/	Peg.	Pengacara	Notaris	Guru	Dosen	Dokter	Perawat	Pendeta	Pensiun	Pengusaha	Honor	Arsitek	Teknisi	Petani	Nelayan	Peternak	Pengrajin	Dan lain2
1	Sektor			10	12					10			3	1	6		12			120	18	3	1	7
2	Unit																							

format diatas menggambarkan pekerjaan pokok Jemaat GPM Lermatang sebagai berikut: Pns. 10, peng. Swasta 12, Guru 10, Perawat 3, Pdt 1, honor 12, Petani 120 Nelayan 18, Peternak 3, Pengrajinan 1, dan lain-lain 7

e.1.2. Sumber daya ekonomi rumahtangga yang tersedia di tiap jemaat

yaitu keberadaan lahan atau tempat usaha milik warga jemaat atau milik gereja (mis. Kebunn jemaat, koperasi, dll)

- Sektor Perkebunan

No.	Sektor	Unit	Jenis dan Luas Lahan						
			Kelapa	Kakau	Umbian	Cengkih	Pala	Sayuran	Vanili/Lada
1	Laharoi	Teberias	9 ha	... ha	7 ha	... ha	... ha	3 ha	... ha
2		Bukit Zaitun	10 ha		5 ha			3 ha	
3	Sion	Kalvari	10 ha		5 ha			5 ha	
4		Maranatha	11 ha		6 ha			6 ha	
5	Getsemani	Mahanaim	18 ha		4 ha			3 ha	
6		Diaspora	17 ha		6 ha			3 ha	
Jumlah			78 ha		33 ha			20 ha	

Dari data tersebut tidak dapat dipastikan bahwa jenis tanaman seperti kelapa tidak dapat didefenisikan karena merupakan dusun dati yang dikelola oleh keluarga besar yang sebagian anggota keluarga berasal dari jemaat GKPII begitu pula untuk sektor perikanan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya.

- Sektor Perikanan dan Rumput laut

No.	Sektor	Unit	Jenis Usaha & Produk						
			Puri	Pancing	Tangkap	R.Laut	Udang	Tambak	Siput/Lobster
1	Laharoi	Teberias	...Ton	1 Ton	1 Ton	2 Ton	... Ton	... Ton	Ton
2		Bukit Zaitun		1 Ton	1 Ton	2 Ton			
3	Sion	Kalvari		1 Ton	1 Ton	1 Ton			1 Ton
4		Maranatha		1 Ton	1 Ton	1 Ton			
5	Getsemani	Mahanaim		1 Ton	1 Ton				
6		Diaspora		1 Ton	1 Ton	1 Ton			
Jumlah				6 Ton	6 Ton	7 Ton			1 Ton

[Jenis perikanan dapat disesuaikan dengan kondisi di masing-masing Jemaat. Dari data ini sudah bisa diprediksi perencanaan bidang perekonomian tetapi juga aktivitas pemberdayaan]

- Sektor Peternakan

No.	Sektor	Unit	Jenis Usaha								
			Kambing	Sapi	Kerbau	Domba	Kuda	Ayam	Babi	Anjing	Unggas
1	Laharoi	Teberias						11	2	10	
2		Bukit Zaitun						12	4	12	
3	Sion	Kalvari		1				9	3	7	
4		Maranatha						7	1	9	
5	Getsemani	Mahanaim						5	2	5	
6		Diaspora		1				6	2	3	
Jumlah				2				39	14	46	

- [Perlu diperhatikan bahwa, jenis pekerjaan peternakan yang dicatat ialah kepada warga Jemaat yang memelihara ternak untuk kepentingan ekonomis. Jadi jika ada yang memelihara anjing rumah atau untuk berburu, maka itu bukan jenis potensi peternakan yang harus didatakan.

- Jenis tanaman dapat disesuaikan dengan kondisi di masing-masing Jemaat. Dari data ini sudah bisa diprediksi perencanaan bidang perekonomian tetapi juga aktivitas pemberdayaan

- Sektor Kehutanan

No.	Sektor	Unit	Jenis Kayu				
			Jati	Meranti	Lenggua	Samama	Lainnya (sebutkan)
1	Laharoi	Teberias	20		1		
2		Bukit Zaitun	16		1		
3	Sion	Kalvari	23		1		
4		Maranatha	22		1		
5	Getsemani	Mahanaim	19		1		
6		Diaspora	26		1		
Jumlah			126		6		

[perhatikan bahwa dari data yang diperlihatkan, apa yang bisa dilakukan oleh Jemaat terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan hutan. Lalu, bagaimana prospek pengembangan ekonomi sesuai kekayaan alam di sektor kehutanan]

- Sektor riil/wirausaha

No	Sektor	Unit	Jenis Usaha											
			Kios	Peramu	Speedboard	Ketangkas	Warnet	bengkel	industri	Berburu	Peramu	Kost	Wisata	
1	Laharoi	Teberias	6 bh		6 bh	org	bh	org			3org	org	bh	1 bh
2		Bukit Zaitun	3 bh		9 bh	org	bh	1org			3org	org	bh	bh

3	Sion	Kalvari	3 bh	10 bh	org	bh	org			2org	org	bh	bh
4		Maranatha	3 bh	8 bh	org	bh	org			2org	org	bh	bh
5	Getsemani	Mahanaim	1 bh	7 bh	org	bh	2org			2org	org	bh	bh
6		Diaspora	2 bh	4 bh	org	bh	1org			2org	org	bh	bh
Jumlah			18 bh	44 bh									1 bh

[dari data yang terdeskripsi di atas, maka dapat dilakukan tindakan intervensi pengembangan ekonomi Jemaat , dan bagaimana melakukan pembinaan terhadap kewirausahaan yang ada. Data terkait sektor riil/wirausaha dapat ditambahkan kolom sesuai dengan keberadaan sektor riil/wirausaha yang ada di jemaat masing masing.]

e.1.3. Usaha ekonomi unggulan milik Jemaat

[perlu diperhatikan bahwa yang dimaksudkan di sini adalah usaha ekonomi yang merupakan komoditas unggulan yang dikelola oleh Jemaat [MJ] dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan dan pengembangan keuangan Jemaat].

[Apabila Jemaat memiliki komoditas unggulan tertentu, misalnya perkebunan, maka mesti digambarkan jenis tanaman, luas lahan, dan status kepemilikan tanah.

e.1.4. Penghasilan dan Pengeluaran pokok rumah tangga Jemaat.

yaitu total pendapatan minimum keluarga jemaat, agar dapat diketahui taraf ekonomi rumah tangga yang memudahkan dilakukannya program intervensi. Data ini perlu pula untuk mengetahui relittas kemiskinan dan bagaimana penanggulangannya.

No.	Sektor	Unit	Total Pendapatan Per bulan (Rp)					
			≤ 300.000	300.001-500.001	500.001-1 jt	1.000.000-2.000.001	≥4 jt	

				500.00		1-2 jt	-4 jt	
1	Laharoi	Teberias	7	1		1	-	
2		Bukit Zaitun	6	2	1	1	1	6
3	Sion	Kalvari	6	4	1	1	-	2
4		Maranatha	8	1	1	1	1	
5	Getsemani	Mahanaim	5	25	1	1	1	
6		Diaspora	12	3		1	1	2
Jumlah			44	36	4	6	4	10

No.	Sektor	Unit	Total Pengeluaran Per bulan (Rp)					
			≤ 300.000	300.001-500.000	500.001-1 jt	1.000.001 - 2 jt	2.000.001 - 4 jt	≥4 jt
1	Laharoi	Teberias	7	1		1	-	
2		Bukit Zaitun	6	2	1	1	1	6
3	Sion	Kalvari	6	4	1	1	-	2
4		Maranatha	8	1	1	1	1	
5	Getsemani	Mahanaim	5	25	1	1	1	
6		Diaspora	12	3		1	1	2

	i							
Jumlah					44	36	4	6

Data ini penting untuk melihat kemampuan jemaat membiayai kebutuhan-kebutuhan dasar tiap hari. Indikatornya dapat dilihat pada pola makan, pembiayaan kesehatan, biaya pendidikan anak dan kebutuhan lain termasuk simpanan uang (di BANK). Pada sisi ini akan ada imbas langsung ke pendapatan gereja. Namun penting diingat bahwa data ini tidak akan dimaksudkan untuk menghitung besar jumlah persepuluhan yang harus diserahkan anggota jemaat, sebab persepuluhan dan persembahan lainnya adalah bagian dari respon terima kasih jemaat atas berkat Tuhan.

e.2. Kualitas pendidikan Jemaat

e.2.1. Keadaan tingkat pendidikan tiap jemaat [sementara dijalani dalam dan atau luar jemaat dan Keadaan Tamatan].

a. Keadaan Tamatan [menurut data kondisi terakhir]

No.	Sektor	Unit	Tamatan/Ijasah Terakhir						
			SD	SMP	SMA/K	Perguruan Tinggi			
						D1-D4	S1	S2	S3
1	Laharoi	Teberias	20	10	7				
2		Bukit Zaitun	5	5	12	2	4	1	
3	Sion	Kalvari	10	10	10		3		
4		Maranatha	2	2	24	2	2		
5	Getsemani	Mahanaim	9	10	15		1		
6		Diaspora	5	5	11		5		

	Jumlah	51	42	79	4	15	1	
--	--------	----	----	----	---	----	---	--

b. Jenjang pendidikan yang sedang ditempuh [menurut kondisi terakhir]

No.	Sektor	Unit	Jenjang Pendidikan Yang Sedang Ditempuh							
			PAUD (PG+TK)	SD	SMP	SMA/K	Perguruan Tinggi			
							D1- D4	S1	S2	S3
1	Laharoi	Teberias	11	11	5	8				
2		Bukit Zaitun	8	9	13	13		2		
3	Sion	Kalvari	9	20	12	12				
4		Maranatha	6	21	17	18				
5	Getsemani	Mahanaim	5	20	18	12		1		
6		Diaspora	10	23	12	11		2		
	Jumlah		49	104	77	74		5		

Dari tabel di atas, memperlihatkan bahwa jenjang pendidikan tergolong tinggi, sedang atau rendah. Dengan demikian, dapat dilakukan tindakan intervensi guna peningkatan kualitas pendidikan di Jemaat.

e.2.2. Keadaan sarana fisik pendidikan [yang tersedia di jemaat

[Dalam kaitan dengan kualitas pendidikan, harus juga diperlihatkan keadaan sarana pendidikan yang terdapat di Jemaat. Dan apakah sarana itu milik gereja (YPPK) ataukah milik pemerintah

Penting digambarkan tentang ketersediaan sekolah di dalam Jemaat , termasuk dan terutama sekolah YPPK Dr. J.B. Sitanala. Ada dua realitas pendidikan yang perlu digambarkan, yakni: sumber daya umat menurut tamatan pendidikan dan realitas pendidikan yang sedang dijalani dalam kurun waktu pelaksanaan Renstra.

No.	Ketersediaan Sarana Pendidikan					
	PAUD	TK	SD	SMP	SMA/K	PT
1bhbh	1 bhbhbhbh

(Perlu pula dijelaskan kondisi fisik, seperti apakah ruang kelas cukup memadai, adakah sarana perpustakaan, laboratorium, dll)

e.2.3. Keadaan siswa dan guru di tiap jemaat [menurut kondisi terkini; dengan memperhatikan akses pendidikan

Pengisian keadaan siswa dan guru sesuai tabel di bawah, hanya dilakukan apabila sekolah tersebut adalah milik gereja [YPPK Dr. J.B. Sitanala]

.	Kelas	Keadaan Siswa dan Guru					
		SD		SMP		SMA/K	
		Siswa	Guru	Siswa	Guru	Siswa	Guru
1	I	27	1				
2	II	46	1				
3	III	35	1				
4	IV	36	1				

5	V	36	1				
6	VI	45	1				
Jumlah		225	6				

Keterangan:

Data ini untuk melihat keadaan guru berbanding siswa

No	Keadaan Guru																			
	Sektor	Unit	SD						SMP						SMA/K					
			Honor	PNS	SK Yayasan	D2/D3	S1	S2	Honor	PNS	SK Yayasan	D2/D3	S1	S2	Honor	PNS	SK Yayasan	D2/D3	S1	S2
1			3	6	-		7													
2																				
3																				
4																				

Dengan memperlihatkan data tersebut, dapat diketahui potret mutu pendidikan YPPK untuk kepentingan intervensi pelayanan. Juga melihat keadaan guru terkait status kepegawaian; honorer atau guru PNS tetapi juga tingkat pendidikan, D2, D3, D4, S1 atau S2].

3. Kondisi Fisik Rumah Hunian dan Kualitas Kesehatan Jemaat

[Penggambaran fisik rumah hunian dan kualitas kesehatan Jemaat merupakan realitas yang patut digambarkan. Ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan Jemaat, termasuk rumah tempat huniannya]

e.3.1. Kondisi fisik Rumah Hunian keluarga

Penggambaran kondisi fisik rumah hunian meliputi, status hunian, status tanah, konstruksi bangunan, lantai bangunan, gedung bangunan, atap bangunan, sumber penerangan, sumber air minum, MCK, kondisi rumah]

a. Status Hunian/Tempat Tinggal

No	Sektor	Unit	Status Hunian/Tempat Tinggal				
			Rumah sendiri	Rumah orang tua	Rumah Saudara	Kontrakan/kost	Rumah Jabatan/Dinas
1	Laharoi	Teberias	27				
2		Bukit Zaitun	29				
3	Sion	Kalvari	34				
4		Maranatha	32				
5	Getsemani	Mahanaim	34				1
6		Diaspora	26				
Jumlah			182				1

b. Status Tanah

No.	Sektor	Unit	Status Tanah Bangunan			
			Hak milik	HGB/Pakai	HGU	Tanah Negara
1	Laharoi	Teberias	27			
2		Bukit Zaitun	29			
3	Sion	Kalvari	34			
4		Maranatha	32			

5	Getsemani	Mahanaim	34			
6		Diaspora	26			
Jumlah			182			

c. Konstruksi Bangunan

No	Sektor	Unit	Konstuksi Bangunan			
			Permanen bertingkat	Permanen	Semi permanen	Darurat
1	Laharoi	Teberias		27		
2		Bukit Zaitun		29		
3	Sion	Kalvari		34		
4		Maranatha	1	31		
5	Getsemani	Mahanaim		32	2	
6		Diaspora		25	1	
Jumlah			1	179	3	

d. Fisik Bangunan Rumah

No	Sektor	Unit	Lantai Bangunan Rumah							Atap Bangunan					
			Kerami k	Seme n	Papan	Tanah	Pasir	Batu	Bambu	Zink	Multiroo f	Asbes	Genteng	Rum bia/s agu	Daun kelapa
1	Laharoi	Teberias	18	8						30					
2		Bukit Zaitun	20	8	2	3				30		1			
3	Sion	Kalvari	25	8		3				30		1			
4		Maranatha	22	8		1				30					
5	Getsema ni	Mahanaim	20	9		2				30					
6		Diaspora	15	9	1	1				30		1			
Jumlah			120	50	3	10				180		3			

e. Sumber penerangan, Air minum dan MCK

No	Sektor	Unit	Sumber Penerangan				Air minum						MCK	
			PLN & Generator	PLN	Generator	Lampu Minyak	PAM & sumur	PAM	Sumur	Sumur Bor	Sungai	Bak Penampung	Ada	Tidak
1	Laharoi	Teberias		27				14	10				28	2
2		Bukit Zaitun		29				19	16	1			30	2
3	Sion	Kalvari		34				22	13	1			26	2
4		Maranatha		32				17	12				30	1
5	Getsemani	Mahanaim		34				16	13				28	3
6		Diaspora		26				13	16				28	3
	Jumlah			183				101	80	2			170	13

e.3.2. Gambaran Sanitasi Lingkungan.

[Bagian ini perlu untuk mengetahui kondisi kesehatan Jemaat. Jenis penyakit yang umum diderita warga Jemaat, termasuk jenis penyakit akut dan/atau wabah. Juga gambaran tentang keadaan lingkungan dalam Jemaat]

e.3.3. Sarana kesehatan yang tersedia

[Pada bagian ini, penggambaran menyangkut sarana/fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia [Puskesmas, Pustu, Polindes, Pos Yandu, Rumah Sakit] di Jemaat , sehingga dapat terbaca pelayanan kesehatan bagi Jemaat yang sakit.

e.3.4. Ketersediaan tenaga medis

[Di bagian ini digambarkan ketersediaan tenaga medis di Jemaat: dokter, mantri, perawat atau bidan. Hal ini untuk memahami ketangguhan pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah pelayanan, sekaligus menjadi masukan kepada pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah daerah].

No	Sektor	Unit	Tenaga Medis			
			Dokter	Mantri	Suster	Bidan
1	Laharoi	Teberias				
2		Bukit Zaitun				1
3	Sion	Kalvari				
4		Maranatha		1	1	
5	Getsemani	Mahanaim				
6		Diaspora				
	Jumlah			1	1	1

f. Dinamika Sosiologis-Kultural Jemaat

Di bagian ini, dua hal penting yang patut digambarkan, yakni corak sosiologis dan corak kultural. Dengan memaparkan kedua realitas ini, sosiologi Jemaat dan aspek kultural menjadi sesuatu yang tidak dapat dinafikan dalam perencanaan strategis selama periode Renstra.

Jemaat GPM Lermatang adalah jemaat yang berada di dalam desa Lermatang yang merupakan salah satu desa adat yang ada di Kepulauan Tanimbar. Kepala pemerintahannya adalah Raja yang dipilih oleh masyarakat namun berasal dari Soa yang memang ditetapkan untuk menjadi kepala pemerintahan/Raja. Desa/negeri Lermatang, baru saja mengalami pergantian kepemimpinan dari Raja yang lama kepada Raja yang baru. Proses pergantiannya melewati musyawarah di antara masyarakat dan mereka melakukannya secara demokrasi lewat pemungutan suara. Raja yang berhasil dipilih kemudian ditetapkan sebagai raja yang baru adalah Bpk. Akheel Nusmesse dan Sekretaris Ridolf Kelbulan. Saat kami melakukan penelitian, kelengkapan desa/negeri berupa staf pemerintahan yang lain belum terbentuk karena adanya masalah internal di antara mereka¹⁷.

Masyarakat di negeri Lermatang yang juga adalah Kemaat GPM Lermatang adalah masyarakat yang Heterogen. Mereka tidak hanya terdiri dari masyarakat asli negeri Lermatang tetapi juga terdiri dari masyarakat dari daerah lain di Maluku. Percampuran itu terjadi karena perkawinan tetapi juga karena pekerjaan, di mana ada masyarakat dari daerah lain yang bekerja di situ dan menjadi warga masyarakat juga warga jemaat GPM Lermatang. Seorang ibu mengatakan :

*Beta bukan orang Lermatang. Beta asal dari Saparua, besar di pulau Seram tetapi karena menikah dengan orang Lermatang jadi beta tinggal di sini dan beta sudah menjadi orang Lermatang.*¹⁸

*Katong di sini nih su saling baku kaweng (kawin) satu dengan yang lain jadi yang tinggal di sini. Jadi katong su bacampor satu dengan yang lain*¹⁹

Di samping itu, masyarakat Lermatang juga memiliki satu budaya anak angkat, di mana orang Lermatang yang karena alasan tertentu dapat menjadikan orang lain yang memiliki hubungan tertentu, kemudian mengangkatnya sebagai anak angkat. Anak angkat itu diberikan beberapa hal seperti mendapatkan tanah kemudian bisa membangun rumah dan menguasai tanah itu.

¹⁷ Hasil wawancara dengan R.K., 14 Oktober 2021

¹⁸ Hasil wawancara dengan ibu N.

¹⁹ Hasil wawancara dengan B.

Kemarin saat inpex datang, ada yang biking anak angkat, la kasi dong tanah sapanggak, sakarang dong su tinggal, su bangun rumah, su biking kios sapanggal di situ²⁰

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jemaat GPM Lermatang adaah jemaat yang keanggotaannya heterogen dan bukan homogen.

Jemaat GPM Lermatang yang berada di dalam negeri Lermatang adalah wilayah yang akan dijadikan wilayah pertambangan migas, dengan demikian maka Jemaat GPM Lermatang adalah calon jemaat yang akan melayani warga jemaat yang kelak bergerak di bidang pertambangan migas. Tentu saja hal ini akan menjadi perhatian seirius bagi jemaat karena mesti lagi memikirkan strategi pelayanan yang baik dengan memperhitungkan kondisi riil dimana jemaata yang dilayani tidak hanya jemaat petani, nelayan, PNS dan swasta lainnya tetapi juga adalah jemaat yang adalah pekerja tambang migas. Jemaat yang dilayani akan semakin heterogen lagi.

g. Dinamika Ekumene dan Relasi antar Lembaga

Pada bagian ini diharapkan akan tergambar:

Di negeri Lermatang, masyarakatnya menjadi penganut Kristen Protestan yakni dari gerjea Protestan Maluku tetapi juga GKPII. Sejarah gereja di Lermatang ini menunjukkan bahwa awalnya mereka adalah warga GPM buah pekabaran Injol dari Yoseph Kam, namun kemudian mengaami perkembangan. GKPII kemudian masuk di Lrmatang sehingga sebagian warga GPM beralih ke GKPII.

Awalnya tuh dong sadiki saja, tetapi karena adamasalah sadiki lalu dong pindah samua cuam tinggal 5 KK saja. Tapi skarang banya yang su bale kombali di GPM.²¹

Waktu beta mulai maso, itu memang dong banya, tetapi beta tingkatkan pelayanan saja. Sekarang su bnaya yang bale di GPM. Antara betadeng dong pung Pendeta, biasa saja, demikian juga dengan jemaat. Betatetap bangun komunisai yang baik deng dong. Beta juga bangun komunikasi yang baik dengan pemerintah desa dan tua-tua adat karena dong itu yang turt membantu dalam pelayanan Geraja.²²

²⁰ Hasil wawancara dengan ibu N, 14 Oktober 2021

²¹ Hasil wawancara dengan M.M., 12 Oktober 2021

²² Hasil wawancara dengan K.L., 11 Oktober 2021

h. Ketersediaan Akses Internet dan Alat Elektronik.

Bagian ini menjelaskan tentang keberadaan jemaat yang sudah terhubung dengan akses Internet dalam kehidupan keseharian, penggunaannya untuk bisnis, ibadah, mengakses berita dan lain sebagainya. Dengan data ini kita dapat melakukan pembinaan penggunaan media online dan menganalisa tingkat keterbukaan dan respon jemaat terhadap perubahan yang cepat.

Data ini selain menunjukkan ketersediaan akses yang membantu Jemaat dalam hal pelayanan Gereja tetapi juga sekaligus menjadi data pendukung yang menjelaskan bahwa masyarakat Lermatang saat ini bukan lagi masyarakat yang terisolir. Masyarakat Lermatang saat ini adalah masyarakat yang sudah dapat mengakses berbagai hal dunia luar, keterhubungan dengan berbagai pihak baik secara lokal, nasional dan internasional sudah dapat terjadi saat ini. data ini juga dapat memberi penjelasan bahwa berbagai akses informasi terkait dengan rencana pengoperasian penambangan mogas Blok Masela, bukanlah menjadi berita yang tidak dapat diakses.

No	Ketersediaan Akses Internet dan Alat Elektronik													
	Sektor	Unit	Kepemilikan smartphone			Kepemilikan Alat Elektronik							Kepemilikan Wifi (per kk)	Kepemilikan Paket data (per kk)
			Hp biasa (per kk)	Hp Android (per kk)	Tablet/Ipod (per kk)	Laptop (per kk)	Note book (per kk)	Komputer/ PC (Per kk)	TV Kabel (Per kk)	TV Antena (per kk)	TV Indihome (per kk)	TV Parabola (per kk)		
1	Laharoi	Teberias		54		2	1		1		1	27		
2		Bukit Zaitun	-	58		2	1	-	1		1	29		
3	Sion	Kalvari		68		2	1		1		1	34		
4		Maranatha		64		2	1		1		1	32		
5	Getsemani	Mahanaim		70		2	1		1		1	35		
6		Diaspora		52		2	1		1		1	26		

BAB III

3.1. DATA DAN ANALISA

Uraian pada bab 3 ini memuat 4 hal penting yang mengacu dari pertanyaan penelitian yakni pengetahuan masyarakat tentang penambangan Blok Masela, sikap masyarakat menjelang beroperasinya penambangan Migas Blok Masela, dampak akan beroperasinya penambangan Migas Blok Masela bagi masyarakat, serta peran Gereja dalam menyiapkan umat menyambut beroperasinya penambangan Migas Blok Masela.

3.1. PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PROYEK LNG ABADI BLOK MASELA

Informasi bahwa desa Lermatang akan dijadikan sebagai salah satu lokasi kegiatan eksplorasi Minyak dan Gas Bumi sudah diketahui oleh masyarakat sejak tahun 2012,²³ sejak INPEX²⁴ masuk di desa Lermatang. INPEX adalah sebuah badan usaha SKK Migas-Blok Masela, ltd, yang berencana mengembangkan lapangan gas abadi yang berlokasi di pantai laut Arafura, Kabupaten Kepulauan- Provinsi Maluku. Pengembangan lapangan gas terdiri dari : pembangunan dan pengoperasian sumur gas bawah laut, dan struktur bawah laut termasuk perpipaan SURF menuju fasilitas pengelolaan gas terapung di lepas pantai Arafura; Fasilitas pengelolaan Gas Terapung dilepas pantai Laut Arafura, sekitar 150 km Barat Daya Saumlaki (garis lurus), ibukota Kabupaten Kepulauan Tanimbar; Fasilitas OLN (Onshore Liquefied Natural Gas) termasuk LND darat atau fasilitas pendukung.²⁵ Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategi Nasional (PSN) sebagaimana tercantum dalam

²³ Hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat dan anggota masyarakat di antaranya : bapak YR,; GL; bapak MM; PM, Oktober 2021

²⁴ INPEX adalah perusahaan minyak Jepang yang memulai usahanya di Indonesia pada tahun 1966. INPEX beroperasi di Indonesia sejak awal pendiriannya dengan ditandatangani kontrak tanggal 21 Pebruari 1966, dengan nama perusahaan *North Sumatra Offshore Petroleum Exploration Co.,Ltd*. Sejak saat itu, INPEX menjadi menjadi perusahaan terbuka dan berintegrasi (*merger*) serta mengembangkan investasinya di berbagai wilayah di Indonesia melalui berbagai anak perusahaan lainnya di Indonesia dalam INPEX Corporation, INPEX Natuna, Ltd, INPEX Jawa, Ltd., INPEX Sumatera, Ltd., dan atau INPEX Holding, Ltd, INPEX Masela, Ltd, dan lain-lain. Secara Khusus **INPEX Masela** berdiri tahun 1998 yang mendapatkan haknya, untuk melakukan kegiatan eksplorasi di Blok Masela melalui penandatanganan kontrak Masela PSC pada tanggal 16 Nopember 1988. Sejak saat itu, INPEX melalui INPEX Masela, Ltd telah melakukan kegiatan eksplorasi Hidrokarbon di Blok ini, dengan kepemilikan saham 100%.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Inpex>

²⁵ Lihat Buku I Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup oleh INPEX Masela, Ltd, Oktober tahun 2019.

Peraturan Presiden RI no 58 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.

Ketika peneliti menanyakan beberapa informan: *apakah mereka mengetahui tentang penambangan Migas Blok Masela akan beroperasi di desa Lermatang?* Seorang informan menuturkan :

Sejak terpilih pada bulan Juli tahun 2007, saya melaksanakan tugas sebagai kepala desa pada bulan Oktober 2007. Tahun 2012, saya dilantik bersama kepala desa lainnya oleh Wakil Bupati. Pada saat memulai tugas sebagai kepala desa, saya mendengar bahwa ada investor Blok Masela yang mau beroperasi di kepulauan Tanimbar Selatan yakni Desa Lermatang. Melalui Keputusan Presiden, dibentuklah tim gabungan yang terdiri dari beberapa negara yakni Indonesia, Australia, Korea, Amerika dan Jepang. Di antaranya juga ada beberapa dosen dan mahasiswa dari UKI Jakarta; Dan sejak tahun 2012, tim INPEX tersebut telah turun dan melakukan survey di Lermatang yakni pada tahun 2012; 2013; 2015; 2017; 2018 dan tahun 2019.²⁶ Beberapa hal yang disurvei yakni : situasi sosial dan budaya (adat istiadat), areal hutan dan margasatwa, petuanan desa Lermatang, struktur tanah, batu-batuan, lautan dan hasilnya, dan lain-lain.

“Setelah beberapa kali Tim INPEX turun melakukan survey di Lermatang, saya pernah diundang oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Bapak Bupati). Ketika bertemu beliau menginformasikan bahwa desa Lermatang akan diperuntukkan menjadi proyek Strategi Nasional. Beliau juga mengatakan bahwa Pemerintah Daerah di desa harus mempersiapkan lahan sebanyak 1500 Ha untuk proyek dimaksud.” Tetapi belum jelas, 1500 Ha ini di sebelah mana? Apakah yang disapaikan oleh pemda itu sebelah Barat, Timur, Utara atau Selatan? ²⁷

Ketika masuknya Proyek Nasional atau INPEX maka akan terjadi perubahan besar-besaran;²⁸ masyarakat akan dikuasai;²⁹ terjadi peralihan dalam hak kepemilikan tanah adat (ulayat);³⁰ bahkan semua anggota masyarakat akan mengalami relokasi.³¹

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Jantje Rangkoli (Mantan kepala Desa Lermatang Periode 2007-2012; 2013-2019), Oktober 2021.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Jantje Rangkoli (Mantan kepala Desa Lermatang Periode 2007-2012; 2013-2019), Oktober 2021 di Desa Lermatang.

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Jantje Rangkoli dan bapak Gustav Lamere, Oktober 2021, di Desa Lermatang.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak GL; Oktober 2021, di Desa Lermatang

³⁰ Hasil wawancara dengan bapak JR (Mantan Kepala Desa Lermatang Periode 2007-2012; 2013- 2019) & Bapak GL Oktober 2021.

³¹ Hasil wawancara dengan bapak JR (Mantan Kepala Desa Lermatang Periode 2007-2012; 2013- 2019) & Bapak GL, Oktober 2021.

*Mama mengetahui tentang INPEX dari rapat desa, pada tahun 2016. Selain itu ketika Tim INPEX melakukan survey keliling hutan, mengecek batas tanah, petuanan, dan situasi atau kondisi masyarakat. Kebetulan mama juga adalah salah satu pengurus BPD sie perempuan.*³²

Dari hasil wawancara di atas, nampak bahwa informasi tentang INPEX atau Proyek Nasional Blok Masela ini sudah diketahui masyarakat Lerमतang. Informasi tersebut diketahui dari tim INPEX yang pernah beberapa kali datang melakukan Survei; dari pemerintah Kabupaten/Desa maupun dari tokoh agama (pendeta). Masyarakat juga mengetahui bahwa dengan masuknya proyek INPEX, maka akan terjadi perubahan secara besar-besaran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan budaya. Termasuk masyarakat juga akan tergusur dari lokasi tempat tinggalnya ke lokasi baru yang akan disediakan oleh Pemerintah. Namun pengetahuan dan informasi utuh tentang kegiatan pertambangan belum menyebar ke semua kalangan (hanya diketahui oleh orang-orang tertentu). Pengetahuan masyarakat secara detail tentang apakah itu INPEX?, bagaimanapengembangan penambangan gas tersebut?Bagaimana cara beroperasinya, kapan penambangan tersebut akan dimulai?dimanapusat lokasinya? kapan dan dimana masyarakat akan direlokasi?Bahkan dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan masih belum utuh dan holistik dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sebagaimana diungkapkan oleh informan (mantan kepala pemerintahan desa) sebagai berikut³³ :

INPEX sudah masuk tetapi masyarakat belum tahu, bagaimana kesiapan masyarakat menyambut hadirnya proyek tersebut? Jika masyarakat tidak siap, maka masyarakat(anak-anak kita) akan menjadi penonton di daerahnya; mereka juga akan menjadi budak atau babu karena tidak siap secara SDM. Menurutnya banyak hal sudah yang disampaikan kepada kepala desa tetapi informasi tersebut tidak dilanjutkan.

Pada tahun 2018, kami berjumpa dengan Pemda Provinsi terkait Tanjung Nustual.Pada saat itu, pemerintah melarang masyarakat untuk jual-jual tanah; tapi masyarakat juga tidak tahu dimana titik koordinat pertambangan itu dilakukan.

Mengacu dari keterangan di atas, terdapat penjelasan yang agak berbeda dari para informan. Pada satu sisi ada yang mengatakan sudah mengetahui tetapi ada yang mengatakan

³² Hasil wawancara dengan Ibu SM, Oktober 2021 di Desa Lerमतang

³³ Hasil wawancara dengan bapak GL, Oktober 2021

belum mengetahui. Memang **informasi** tentang masuknya Proyek Nasional Penambangan di desa Lermatang sudah disampaikan oleh para Pemerintah Kabupaten melalui Tim INPEK pada setiap kali pertemuan dan dialog publik, yang bukan saja melibatkan kepala desa dan staf tetapi juga melibatkan anggota masyarakat (mewakili). Namun belum semua orang terlibat dalam pertemuan dimaksud, sehingga informasi tentang aktifitas pertambangan masih sangat terbatas kalangan masyarakat.

Dari paparan di atas nampak bahwa sudah ada kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat tetapi dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa belum semua anggota masyarakat terlibat atau mengetahui secara terperinci tentang kegiatan INPEX. Bahkan dalam beberapa kali pertemuan yang diundang hanya pimpinan desa/staf desa atau mereka yang mewakili anggota masyarakat. Informasi tersebut bisa dibenarkan ketika menelusuri Rencana Kegiatan Pengembangan Gas Abadi beserta Fasilitas Pendukungnya dalam Buku Amdal 1. Dalam buku tersebut telah dipaparkan secara detail tentang berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah melalui Tim INPEX. Salah satunya tentang kegiatan Survei dan Kegiatan Sosialisasi dan Dialog Publik di desa Lermatang maupun daerah-daerah sekitarnya yang terdampak Proyek Nasional tersebut. Ada 6 desa yang terdampak kegiatan penambangan Gas Abadi yakni Kecamatan Tanimbar Selatan (Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Latdalam, Desa Matakus) dan Kecamatan Wertamrian (Desa Lorulun dan Desa Tumbur).³⁴ Dokumen tersebut juga menyebutkan tentang wakil masyarakat dari desa yang terdampak yakni berjumlah 19 orang yang rata-rata terdiri dari kepala desa, tua adat, tokoh agama, pendidik dan utusan dari anggota masyarakat. Secara khusus wakil masyarakat dari Desa Lermatang berjumlah 4 orang yakni bapak Jantje Rangkoli (kepala desa); Abraham Rangkoli (tua adat); Karel F. Larifmas, SH (tokoh agama) dan Martha Masela (anggota masyarakat mewakili perempuan).³⁵

Dalam dokumen tersebut juga dijelaskan secara detail tentang Kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Public. Kegiatan Konsultasi Publik tersebut diawali dengan Kegiatan Sosialisasi Rencana kegiatan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten terkait yang melibatkan baik pemerintah anggota masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 3 - 16 Agustus 2019 di Kota Ambon, Kota Saumlaki, Kecamatan Weermatarian, Desa

³⁴ Lihat buku I Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup oleh INPEX Masela, Ltd, Oktober tahun 2019.

³⁵ Hasil wawancara dengan Jantje Rangkoli (mantan kepala desa); Abraham Rangkoli (tua adat); Pdt K.C. Laritmas, SH (tokoh agama) dan Martha Masela (anggota masyarakat mewakili perempuan), di Desa Lermatang, Oktober 2019.

Lermatang, Desa Bomaki, Desa Lermatang, Desa Latdalam, Desa Matakus dan Desa Olilit.³⁶ Secara khusus Kegiatan Konsultasi dan Sosialisasi Publik di desa Lermatang dihadiri oleh 150 peserta yang berlangsung pada tanggal 10 Agustus 2019 yang berpusat di Balai Desapukul 15.30 -18.30, dengan peserta yang hadir berjumlah 150 orang.

Dari informasi dan paparan di atas, nampak pada satu sisi dari pihak pemerintah (INPEX) telah melakukan kegiatan sosialisasi terkait Proyek Nasional INPEX baik di Desa Lermatang maupun desa-desa lainnya yang terdampak. Namun di sisi lain, belum semua anggota masyarakat terlibat dalam kegiatan tersebut sehingga ketersebaran informasi di kalangan masyarakat masih sangat terbatas

Walaupun pengetahuan dan pemahaman masyarakat masih terbatas, Tim INPEK melalui pemerintah sudah menginformasikan kepada masyarakat melalui digelarnya kegiatan Konsultasi dan Sosialisasi Public secara berturut-turut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.³⁷

³⁶ Pelaksanaan Sosialisasi dan konsultasi Publik berlangsung berturut-turut di Kota Ambon dihadiri oleh 62 peserta (6 Agustus 2019); kota Saumlaki dihadiri oleh 167 peserta (8 Agustus 2019); desa Olilit dihadiri oleh 151 peserta (15 Agustus 2019); desa Lorulun dihadiri oleh 96 peserta (9 Agustus 2019); desa Lermatang dihadiri oleh 150 peserta (10 Agustus 2019); desa Bomaki dihadiri oleh 78 peserta (12 Agustus 2019); desa Latdalam dihadiri oleh 325 peserta (13 Agustus 2019); dan desa Matakus dihadiri oleh 108 peserta (14 Agustus 2019). Lihat buku I Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup oleh INPEX Masela, Ltd, Oktober tahun 2019.

³⁷ Gambar dan dokumentasi terkait Kegiatan Konsultasi dan Sosialisasi Publik tersebut diambil dari buku I Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup oleh INPEX Masela, Ltd, Oktober tahun 2019.

**Gambar a dan b
Sosialisasi Publik di Ambon**



(a)



(b)

Activate Windows

**Gambar c dan d
Sosialisasi Publik di Kota Saumlaki**



(c)



(d)

**Gambar e dan f
Sosialisasi Publik di Kecamatan Weertamrian**



(e)



(f)

Activate Win

**g dan h
Sosialisasi Publik di desa Lermatang**



(g)



(h)

Activate Windows

Gambar i dan j Sosialisasi Publik di desa Bomaki



(i)



(j)

Activate Windows

Gambar k dan l Sosialisasi Publik di desa Latdalam



(k)



(l)

Gambar m dan n

Sosialisasi Publik di desa Matakus



(m)



(n)

Gambar o dan p Sosialisasi Publik di desa Olilit



(o)



(p)

Berdasarkan data-data di atas, maka disimpulkan bahwa pada umumnya masyarakat mengetahui tentang rencana dan kegiatan Pertambangan di Lermatang dan desa lainnya yang terdampak. Namun pengetahuan masyarakat terkait Rencana Kegiatan Penambangan Gas Bumi di Masela belum utuh dan holistic sehingga berdampak pada kesiapan masyarakat terkait proyek dimaksud.

. 3.2. SIKAP MASYARAKAT TERKAIT PROYEK LNG ABADI BLOK MASELA

Persepsi dan sikap masyarakat Lermatang menyambut masuknya INPEX dan kegiatan pertambangan dijelaskan secara detail dalam Dalam Buku I Amdal. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa kegiatan Sosialisasi Rencana Kegiatan dan Konsultasi Publik, berlanjut dengan penerimaan SPT dari para peserta yang hadir. INPEX menerima 291 SPT tertulis dari Kegiatan tersebut. Dari 291 SPT, diidentifikasi ada 736 butir saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat yang dapat dikelompokkan ke dalam hal-hal yakni : persepsi masyarakat, dampak terhadap lingkungan, dampak secara social, kesempatan kerja, peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan pelatihan, dampak terhadap mata

pencarian/kegiatan perikanan, dampak terhadap kesehatan; pelestarian warisan budaya dan situs sacral; fasilitas umum dan infrastruktur, pengadaan lahan dan relokasi, keterlibatan dalam amdal, kerjasama antar instansi, kekuatiran terjadinya bencana alam. Informasi jelas tentang proyek, dan lain-lain.³⁸

Dengan kata lain, ada respons yang beragam dari masyarakat ketika mereka mengetahui akan beroperasinya penambangan di desa mereka. Hal tersebut ditunjukkan melalui berbagai sikap atau tanggapan masyarakat, sampai dengan harapan terhadap pemerintah atau INPEX baik sebelum maupun saat beroperasinya penambangan dimaksud. Ada rasa senang dan bangga karena hadirnya pertambangan di desa mereka yang tentu saja berdampak terhadap tingkat ekonomi dan kesejahteraan hidup mereka. Menurut seorang informan, hadirnya pertambangan merupakan berkat besar bagi masyarakat.³⁹ Informan lainnya merasa takut, cemas dan khawatir jangan-jangan dengan hadirnya proyek tersebut masyarakat akan tertinggal dan menjadi budak di tanah miliknya sendiri. Dengan kata lain, berkat besar melalui kegiatan penambangan akan berubah menjadi ancaman dan kutuk bagi kehidupan masyarakatnya. Dan hal ini terjadi jika masyarakat Lermatang sendiri belum atau tidak siap pada saatnya menerima kehadiran kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi tersebut.⁴⁰

Dari hasil wawancara peneliti dengan para informan, ada beberapa sikap masyarakat terkait akan beroperasinya kegiatan pertambangan di desa Lermatang yakni sikap masyarakat; sikap pemerintah desa dan sikap gereja;

3.2.1. SIKAP MASYARAKAT

Dari hasil penelitian, ada 2 sikap yang muncul dalam kehidupan masyarakat sejak INPEX masuk dan akan beroperasinya pertambangan yakni sikap negartif yang dditunjukkan oleh masyarakat sebagai berikut:

a. Dukungan penuh dari Anggota Masyarakat

Bagi masyarakat masuknya pertambangan merupakan kebaikan dan berkat bagi kehidupan masyarakat Lermatang dan karena itu pada prinsipnya masyarakat mendukung. Dukungan masyarakat terhadap kegiatan pertambangan MIGAS nampak sejak pertama kali hadirnya Tim INPEX turun dan melakukan survey di desa mereka. Baik pimpinan maupun anggota masyarakat menerimadan membantu mereka dengan cara memberikan berbagai

³⁸ buku I Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup oleh INPEX Masela, Ltd, Oktober tahun 2019.

³⁹ Hasil wawancara dengan bapak Jantje Rangkoli; Bapak Gustav Lamere; Bapak Beni Rahangmetan; Oktober 2021 di Desa Lermatang.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Gustav Lemere; Bapak Jos Laritmas; Oktober 2021 di Desa Lermatang.

informasi atau data yang dibutuhkan oleh Tim. Menurut para informan, ketika TimINPEX melakukan survey terkait situasi sosial kemasyarakatan, budaya, hutan, dataran dan lautan, anggota masyarakat terlibat bersama-sama dan memberikan berbagai informasi dan data yang Tim butuhkan.⁴¹

Dukungan tersebut juga muncul pada saat kegiatan Konsultasi dan Sosialisasi public di desa Lermatang. Semua pimpinan baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama dan para pendidik serta segenap anggota masyarakat juga turut menghadiri dan memberikan respons positif terkait akan beroperasinya kegiatan pertambangan dimaksud. Dari data yang dihimpun, jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut berjumlah 150 orang. Dukungan tersebut diberikan bukan saja oleh masyarakat Lermatang, tetapi juga oleh masyarakat dari desa-desa yang terdampak (Olilit, Matakus, Bomaki, Latdalam, dan lainnya). Mereka semuanya memberikan respons positif dan mendukung masuknya INPEX dan rencana pertambangan Migas di Blok Masela.

Adanya dukungan masyarakat terhadap masuknya pertambangan Migas dimaksud juga diperkuat oleh Dokumen Amdal tentang Hasil Kegiatan Konsultasi dan Sosialisasi Publik yang dilakukan oleh pemerintah/Tim INPEX. Dalam dokumen tersebut nampak sebagian besar masyarakat menyuarakansetuju dan mendukung secara penuh Rencana Kegiatan pengembangan Lapangan Gas Abadi beserta Fasilitas Pendukungnya di Areal Blok Masela termasuk di dalamnya desa Lermatang.⁴²

b. Mendorong Anak-Anak untuk Studi Lanjut ke Sekolah Pertambangan

Salah satu bentuk dukungan dan sikap masyarakat yakni memberikan kesempatan kepada anak-anak mereka yang telah menamatkan jenjang pendidikan di SMTA/SMU dan/atau sederajat untuk mengikuti studi lanjut ke luar daerah di Perguruan Tinggi lainnya yang ada baik itu di Maluku (Ambon) maupun ke Luar Maluku. Menurut beberapa informan, sebagai berikut:

Mama punya 4 orang anak dan 13 cucu. Salah satu cucu mama sedang melanjutkan Sekolah Pertambangan MIGAS di Cepu. Karena ketika INPEX masuk di desa Lermatang maka tenaganya akan dipakai. Tahun 2021 ada 3 orang anak di Lermatang yang melanjutkan studi ke Cepu yakni Sekolah Pertambangan MIGAS. Terkait dengan biaya studi semuanya ditanggung oleh Pemrrintah, mulai dari keberangkatan

⁴¹ Hasil wawancara dengan JR; Bapak GL, Oktober 2021 di Desa Lermatang

⁴² Buku I Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup oleh INPEX Masela, Ltd, Oktober tahun 2019.

(tiket pesawat), uang semester sampai dengan kebutuhan makan dan kos-kosan.⁴³

Saya sebagai salah seorang peserta yang hadir dalam kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Publik terkait Proyek Nasional. Mereka tidak menerima Ijazah tetapi sertifikat (pengalaman kerja) minimal 5 tahun⁴⁴

Data di atas menunjukkan bahwa seiring dengan masuknya Proyek Nasional dimaksud, maka diperlukan juga peningkatan kualitas SDM. Karena itu baik pemerintah maupun anggota masyarakat, turut memberikan dukungan dan motivasi bagi anak-anak melanjutkan studi di Sekolah Pertambangan. Hal tersebut penting supaya klak masyarakat mampu bersaing ketika masuk Proyek tersebut di Lermatang. Bagaimana anak-anak kami harus sekolah dan memiliki Ilmu sehingga orang lain tidak datang dan perintah kita.⁴⁵

Salah seorang tokoh agama mengatakan sebagai berikut:

Gereja harus berperan aktif untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat termasuk hak atas tanah; gereja juga perlu melakukan pembinaan umat dan mempersiapkan umat supaya kelak mereka siap menyambut beroperasinya pertambangan; gereja juga perlu melakukan proses penyadaran dan mengadvokasi hak-hak masyarakat baik di tingkat Kabupaten/Kecamatan/Kota. Lebih lanjut informan tersebut mengatakan sudah 3 tahun belakangan ini, saya memperjuangkan anak-anak Lermatang untuk melanjutkan studinya di Sekolah Pertambangan MIGAS di Cepu. Dari data yang diperoleh, ada 9 orang anak daerah yang telah melakukan studi lanjut ke Sekolah Pertambangan MIGAS di Cepu, terdiri dari tahun 2019 :2 orang; tahun 2020 : 3 orang dan tahun 2021 : 4 orang.⁴⁶

Dari pemaparan data di atas, nampak juga peran gereja untuk mendorong umat dan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka melalui kegiatan pendampingan dan pembinaan. Sehingga dari data yang berhasil dihimpun terdapat 9 orang anak dari Lermatang yang telah melanjutkan studi ke Sekolah Pertambangan MIGAS di Cepu. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat bahwa mereka sudah harus siap menyambut datangnya perusahaan Nasional INPEX dan kegiatan pertambangan. Salah satu bentuk

⁴³Hasil wawancara dengan Ibu Mia Metan/Luturmas, Oktober 2021, di Desa Lermatang

⁴⁴Hasil wawancara dengan Bapak Gustav Lemere; Bapak Jos Laritmas; Oktober 2021 di Desa Lermatang.

⁴⁵Hasil wawancara dengan Ibu Mia Metan/Luturmas, Oktober 2021, di Desa Lermatang

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Pendeta Jemaat Lermatang, Pdt K.C Laritmas (Pendeta Jemaat GPM Lermatang), Oktober 2021, di Desa Lermatang

kesiapan yakni penyiapan Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui kegiatan studi lanjut anak-anak. Jika tidak demikian maka kelak mereka akan menjadi orang asing di tanah miliknya sendiri dan tertinggal.

c. Kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan

Selain kegiatan studi lanjut anak ke Sekolah pertambangan, kegiatan lainnya yang dilakukan untuk peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Pelatihan-pelatihan bagi masyarakat. Seorang informan menjelaskan beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai berikut⁴⁷:

- a. Kegiatan Pelatihan atau Kursus Bahasa Inggris untuk anak-anak sekolah. Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 1 minggu untuk Anak-anak di jenjang SD, SMP dan SMA. Kegiatan tersebut sudah berjalan 1 tahun sejak tahun 2020. Untuk kegiatan tersebut kami meminta tenaga pengajar dari saumlaki (3 orang) guru Bahasa Inggris, mahasiswa untuk melakukan kegiatan kursus setiap sore s/d malam. Jumlah peserta yang terlibat yakni : 150 orang dan animo anak sangat tinggi terhadap kegiatan tersebut.
- b. Kegiatan Pelatihan tenun untuk Ibu-Ibu mulai tahun 2017-2019. Hampir sebagian besar ibu-ibu mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan dengan Ibu-Ibu PKK dengan menggunakan dana desa. Ada 4 kelompok tenunan, masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang. Jadi jumlah ibu-ibu yakni 40 orang. Kegiatan tersebut berjalan selama 3 tahun. Pada tahun 2020 kegiatan tersebut tidak lagi dilaksanakan.
- c. Kegiatan lainnya yang dilakukan dalam kerjasama dengan Ibu-Ibu PKK.

Dari gambaran di atas, nampak bahwa kegiatan-kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat masih sangat terbatas. Belum ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan, apalagi sejak terpilihnya Raja yang baru. Menurut salah seorang informan, kendalanya di pimpinan desa sehingga pemerintahan desa menjadi pincang. Staf desa yang lain belum diangkat, belum ada program desa dan belum dilaksanakan rapat perdana semenjak terpilihnya Raja (Kepala Desa). Sejak tahun 2020 sampai dengan

⁴⁷Hasil wawancara dengan Ibu Seli Manuri, Oktober 2021, di Desa Lermatang

dilantik tahun 2021, BPD inta dilakukan rapat desa tetapi belum terealisasi sampai saat ini.⁴⁸

Sedangkan informan lainnya mengatakan bahwa sampai dengan sekarang belum ada kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten/Desa. Menurutnya informasi tentang INPEX masih belum sampai ke masyarakat, masih terbatas pada kalangan pemerintah desa. Sehingga sampai dengan ini pun belum ada kegiatan yang dilakukan apalagi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program pemberdayaan masyarakat.⁴⁹ Padahal masyarakat sangat membutuhkan adanya kegiatan-kegiatan melalui program BLK dari pimpinan daerah dan itu dilakukan terpusat di Lermatang. BLK tersebut penting dalam upaya peningkatan kualitas SDM dalam menyambut Proyek Nasional INPEX.

d. Kegiatan Pembangunan Desa, Fasilitas Perumahan dan Jalan serta Alat Transportasi

Salah satu sikap positif yang muncul yakni partisipasi dan tanggungjawab masyarakat melaksanakan kegiatan pembangunan desa. Menurut seorang informan, kondisi perumahan masyarakat sejak informasi masuknya Proyek Nasional INPEX sudah mengalami perkembangan, lingkungan perumahan dan fasilitas perumahan dilengkapi dengan fasilitas ruangan dan peralatan yang cukup bahkan sangat memadai. Demikian halnya perkampungan yang dulunya nampak kotor sudah menjadi bersih, rumah batu sudah berdiri, jalan-jalan yang dulu belum beraspal kini menjadi beraspal. Bahkan hampir setiap keluarga memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1, alat transportasi berupa mobil/angkutan umum, pick up, mobil truk dan mobil Avanza, dll.

Kegiatan pembangunan tersebut bukan semata karena kucuran dana yang disediakan oleh pemerintah melalui dana Desa tetapi juga karena kesadaran masyarakat untuk membangun wilayah dan perumahannya. Semuanya itu merupakan sikap positif yang dimunculkan ketika masyarakat mengetahui tentang masuknya pertambangan di Desa Lermatang.

⁴⁸Hasil wawancara dengan Ibu Seli Manuri, Oktober 2021, di Desa Lermatang

⁴⁹Hasil wawancara dengan Ibu Reni Latumaerissa, Oktober 2021, di Desa Lermatang

e. Maraknya Praktik Penjualan Tanah kepada Para Pengusaha

Selain sikap positif yang telah dijelaskan di atas, muncul juga sikap negative yakni maraknya praktek penjualan tanah.⁵⁰ Bapak mantan kepala desa mengatakan:

Berawal dengan pada bulan Juli 2017, ada 17 keluarga datang kepada saya dan menyampaikan bahwa mereka akan menjual tanah. Sebagai kepala desa, saya tidak mungkin menolak karena pada saat itu saya dicaci maki, diancam dan rumah saya dilempar karena tidak mau melayani masyarakat untuk menjual tanah mereka; Lagi pula belum ada peraturan desa yang mengatur tentang hal tersebut; Jadi saya melayani kebutuhan masyarakat. Setelah jual beli tanah tersebut, saya dipanggil oleh bapak Bupati yang melarang saya untuk menjual tanah. Saya mengatakan kepada beliau, saya harus melayani masyarakat karena kebutuhan masyarakat (anak-anak yang tes polisi/tentara, lanjut kuliah; sakit dan akan dioperasi, dll). Selanjutnya Praktik tersebut terus berlanjut, masyarakat pergi ke pengusaha untuk menjual tanah mereka dalam jumlah yang besar (luas) dan harganya yang sangat rendah. Sampai dengan saat ini tanah sudah terjual kurang lebih sebanyak 1000 Ha.⁵¹ Dan harga penjualan tanah berkisar pada Rp. 10.000 per m².⁵²

Pada saat penjualan tanah tersebut, tanpa koordinasi dengan dengan Kepala Desa. Pada saat itu, rumah bapak mantan kepala desa diserang karena tidak melayani masyarakat untuk menjual tanah mereka;⁵³

Sampai pada pada tahun 2019, Pengusaha lokal (Agus Teodorus) masuk dan membeli tanah-tanah masyarakat;⁵⁴ Dia bekerja sama dengan Sinar MAS (Bapak Oratmangun). Tahun 2019, ada 24 hektar tanah yang dibeli, termasuk dengan areal Hutan Bakau, jadi total keseluruhan ada 34 Hektar.⁵⁵

Dari pemaparan di atas, nampak bahwa praktek menjual tanah memang marak terjadi Desa Lermatang. Sejak INPEX masuk pada tahun 2012, 5 tahun kemudian yakni pada tahun 2017, ada 17 keluarga masyarakat mengutarakan maksud mereka kepada

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Jantje Rangkoli (Mantan kepala Desa); Pdt K.C Laritmas (Pendeta Jemaat GPM Lermatang) ; Bapak Jos Laritmas; Bapak Gustav Lamere; Bapak Beni Batmetang; Ibu Reni Latumaerisa; Bapak Metan Marte; Oktober 2021.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Jantje Rangkoli (Mantan kepala Desa), Oktober 2021.

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Gustav Lamere (kepala Pemerintah Lermatang), Oktober 2021 di Desa Lermatang.

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Beni Batmetan, Oktober 2021.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Petrus Maskikit (tokoh Pemuda); Bapak Beni Batmetan (mantan staf Desa) Bulan Oktober 2021 di Lermatang

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Petrus Maskikit, tokoh Pemuda, Bulan Oktober 2021 di Lermatang

kepala desa bahwa mereka akan menjual tanah. Terkait dengan besaran harga penjualan tanah, sebagian informan memang membenarkan bahwa tanah yang dijual dengan harga Rp. 10.000 per m². Penjualan tanah diakibatkan karena kondisi perekonomian masyarakat yang rendah dan kebutuhan hidup sehari-hari termasuk kebutuhan anak-anak untuk sekolah. Sebagian besar masyarakat adalah para petani dan para nelayan yang sebagian besar menggantungkan kehidupan mereka dari hasil daratan dan lautan dan tidak seberapa jika dibandingkan dengan para pegawai. Ketika membutuhkan dana dalam jumlah yang besar, mereka mengalami kesulitan dan terpaksa harus menjual tanah milik mereka. Padahal tanah tersebut adalah peninggalan dari orangtua (leluhur) dan merupakan tanah adat; sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Dan ini sangat disesalkan.

Peneliti berupaya mengkonfirmasi data tersebut dengan beberapa anggota masyarakat yang melakukan praktek menjual tanah (namun tidak mau menyebutkan identitas mereka), mengatakan sebagai berikut:

Saya terpaksa menjual tanah karena kebutuhan sehari-hari (makan dan minum)⁵⁶; kebutuhan sekolah anak-anak⁵⁷; studi lanjut⁵⁸; membeli sepeda motor⁵⁹; menjual tanah membeli mobil; membeli motor dan dan usaha mobil (bisnis)⁶⁰; membangun dan merenovasi rumah.⁶¹

Beberapa Informan lainnya mengatakan saya tidak punya tanah, tapi suami saya memiliki tanah keluarga dan kami terpaksa menjual sebagian dari tanah tersebut karena anak saya mau masuk tentara dan mesti membayar dana yang cukup besar (puluhan juta) dan kami tidak punya uang sebesar itu; ⁶²Yang lainnya mengatakan untuk biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit.⁶³

Di satu sisi, memang sangat disesalkan maraknya praktek penjualan tanah. Tetapi jika mengetahui alasan masyarakat menjual tanah, semua informan mengatakan terkait kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Namun sangat disayangkan adalah tanah tersebut dijual dengan harga yang sangat murah, bahkan tidak logis (Rp.10.000) per meter.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan NN, Oktober 2021, di Desa Lermatang.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan NN, Oktober 2021, di Desa Lermatang.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan NN, Oktober 2021, di Desa Lermatang.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan NN, Oktober 2021, di Desa Lermatang.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan NN, Oktober 2021, di Desa Lermatang.

⁶¹ Hasil wawancara dengan NN, Oktober 2021, di Desa Lermatang.

⁶² Hasil wawancara dengan NN, Oktober 2021, di Desa Lermatang.

⁶³ Hasil wawancara dengan NN, Oktober 2021, di Desa Lermatang.

Praktik penjualan tanah tersebut semakin marak dan terus meningkat secara drastis sampai tahun 2019 dan sekarang ketika terjadi kerjasama antara pengusaha Lokal dan Perusahaan besar milik penguasa. Masyarakat menjual tanah milik mereka dalam jumlah yang besar dan sangat luas kepada seorang pengusaha terkenal yakni AT (Inisial) dan PT Sinar Mas. Kepada salah satu pembeli (pengusaha lokal yakni Agus Theodorus), peneliti berupaya melakukan konfirmasi data dan menyatakan alasannya. Ternyata yang bersangkutan juga membenarkan bahwa Ia telah membeli sejumlah besar tanah masyarakat Lermatang, dan sampai sekarang ini, tanah yang Ia beli kurang lebih berjumlah 1000 Ha (Hektar). Dari hasil wawancara berturut-turut, beliau mengatakan sebagai berikut⁶⁴:

Luas tanah yang saya beli sangat beragam, mulai dari sebidang tanah dengan ukuran yang kecil sampai dengan ukuran 1 dan 2 Hektar. Saya hanya mau membantu masyarakat, karena mereka butuh uang dan datang kepada saya untuk membantu membeli tanah mereka. Saya membeli tanah mereka, saya hanya membantu masyarakat yang susah; tetapi disayangkan mereka tidak menabung atau menginvestasi uang hasil tanah yang mereka telah jual; mulai dari puluhan juga 200-an juta. Bahkan ada yang lebih dari jumlah tersebut.

Sebagai seorang pengusaha, tentu saja saya harus bisa membaca peluang bisnis. Ketika INPEX masuk di Lermatang, akan didatangkan sekitar 40.000 tenaga kerja dari Luar Maluku termasuk tenaga kerja lokal. Karena itu menurut saya, usaha yang menjanjikan prospek ke depan di lokasi tersebut adalah Usaha Rumah Makan dan Kos-Kosan (tempat tinggal).

Ada 2 alasan mendasar yang dikemukakan oleh pihak pembeli (pengusaha) yang membeli tanah masyarakat dengan harga yang murah yakni karena mereka membutuhkan uang dan karena kepentingan investasi. Sebagai seorang pengusaha, tentu saja naluri untuk membaca peluang pasar ketika perusahaan nasional masuk ke Desa Lermatang. Karenanya sudah menginvestasi tanah/lahan kosong sejumlah 1000 Hektar dari hasil pembelian tanah Masyarakat. Namun sangat disayangkan, adalah harga jual beli tanah tersebut yang sangat tidak rasional. Mungkin karena harga tanah yang sangat murah juga sehingga menyebabkan pengusaha tersebut mengambil/membeli tanah masyarakat dalam jumlah ribuan Hektar. Sebagai anggota masyarakat tentu saja mereka sangat dirugikan dengan sikap pengusaha (pembeli) tersebut. Tetapi dari sisi masyarakat itu sendiri, mereka tidak merasakan bahwa mereka sementara dirugikan oleh para pembeli tanah. Yang penting

⁶⁴ Hasil wawancara dengan AT (pengusaha lokal dan pembeli tanah), Oktober 2021, di Kota Saumlaki.

yakni kebutuhan mereka teratasi, padahal mereka tidak mempertimbangkan akibat lainnya yang muncul dari hasil penjualan tanah. Salah satunya yakni mereka akan semakin tergusur dari wilayahnya dan kehilangan hak atas tanah pertuanan milik nenek moyang mereka. Dengan kata lain, cara pandang (cara berpikir) masyarakat yang masih sangat rendah.

Beberapa informan mengatakan sebagai berikut:

Pola pikir masyarakat yang rendah tentang hak ulayat mereka dan pemahaman tentang hukum masih sangat terbatas, sehingga mereka tergiur dengan uang yang banyak hasil penjualan tanah ketika ada kebutuhan. Masyarakat dulu khususnya ibu-ibu papalele, untuk hidup mereka berdagang ke Sumlaki untuk dapat uang; sekarang mereka lebih suka ke hutan, merintis lahan untuk mendapatkan uang. Dulu pengolahan lahan berpindah setiap tahun, tapi sekarang mereka sudah komersialkan tanah lahan itu untuk uang. Tanah bukan semakin luas, tapi semakin sempit.⁶⁵

Perubahan besar-besaran terjadi ketika Proyek Nasional Masuk. Salah satunya yakni perombakan atau pergeseran hak-hak atau kepemilikan atas tanah adat; Dulu 1 orang 1 lahan tetapi kemudian masyarakat menggeser batas tanah dan membuka lahan di hutan, sehingga 1 orang sekarang bisa saja 1 Ha tanah.⁶⁶ Di Lermatang, siapa kuat dia menang, siapa yang keluarga banyak, maka pertuanannya banyak; Siapa yang banyak anak, banyak tanahnya karena mereka bisa membuka/merintis hutan, dan mengkapling tanah-tanah tersebut sebagai milik mereka;⁶⁷ Masyarakat sekarang beda dengan yang lalu, sekarang hampir semua rumah memiliki motor dan mobil dari hasil penjualan tanah. Desa sudah hancur, tata adat tidak lagi diakui termasuk hak ulayat masyarakat menyangkut pertuanan /hak-hak atas tanah adat.⁶⁸

Dari informasi di atas, kita mengetahui bahwa praktek penjualan tanah bukan saja disebabkan karena kebutuhan masyarakat tetapi karena tingkat pendidikan masyarakat yang sangat terbatas (rendah). Tidak ada sekolah SMA di Lermatang, anak-anak yang telah menyelesaikan studi di jenjang SMTP harus melanjutkan studi di kota Saumlaki. Sehingga banyak masalah yang muncul, mulai dari kecelakaan karena pergaulan bebas, sampai anak putus sekolah yang cukup tinggi. Ada anak-anak yang punya kesadaran untuk sekolah lanjut

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Yos Laritmas, Oktober 2021 di Desa Lermatang.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Gustav Lamere (kepala Pemerintah Lermatang), Oktober 2021 di Desa Lermatang.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Petrus Maskikit, Oktober 2021 di Desa Lermatang.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Yakonias Manuhutu, Oktober 2021 di Desa Lermatang.

tetapi mereka tidak memiliki uang, sehingga mereka lebih memilih tinggal di kampung.⁶⁹ Hal tersebut menyebabkan ketika ada tawaran mudah dan cepat yang bisa menghasilkan uang yang banyak, mereka tidak berpikir panjang lagi, selain mendapatkan uang.

Bahkan untuk kepentingan mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak, ada anggota masyarakat yang menjadi serakah. Ada yang tidak puas dengan tanah milik mereka. Hutan yang masih kosong pun, diritis dan ditebang untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah tersebut. Setelah memiliki, mereka menjual kepada para pembeli dengan harga murah dibawah standar penjualan tanah dan dalam jumlah tanah yang sangat luas (berhektar-hektar). Karena ingin memiliki uang banyak. Seorang informan mengatakan sikap atau perilaku masyarakat yang sekarang terjadi setelah INPX masuk yakni: sikap /perilaku masyarakat menjadi berubah; hidup konsumtif; konsumerisme; naik motor tinggi-tinggi, bahkan anak-anak sekolah yang tidak bisa bawa motor besarpun bisa membawanya, tak terkecuali perempuan. Mereka juga sring berfoya-foya, minum mabuk, bahkan terjadi kemerosotan dalam nilai-nilai etika dan moral termasuk cara berbusana.⁷⁰

3.2.2. SIKAP PEMERINTAH DESA LERMATANG

Dari sudut pandang pemerintah desa, pada awalnya mereka tidak setuju dengan ulah masyarakat terkait praktek penjualan tanah. Tetapi pada akhirnya mereka mengalah karena nyawa dan keluarga mereka terancam. Beberapa informan menuturkan

Saya dicaci maki, rumah saya dilempari dengan batu karena tidak mau melayani masyarakat waktu mereka hendak menjual tanah.⁷¹ Bahkan pada tahun 2017, ketika para pembeli datang untuk membeli tanah masyarakat, setelah itu saya dipanggil oleh Bupati dan Bupati melarang saya menjual tanah. Saya menjelaskan kepada Bupati, tugas saya adalah untuk melayani masyarakat karena ada anak-anak yang mau tes polisi, studi lanjut, dan yang sakit sehingga membutuhkan biaya perawatan yang cukup tinggi.⁷²

Pada waktu itu, ketika penjualan tanah pada tahun 2017, rumah bapak mantan kepala desa diserang karena beliau tidak mau melayani masyarakat. Bapak Mantan kepala desa tidak mau melayani karena waktu itu belum ada Perda yang mengatur tentang batas petuanan

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Yos Laritmas, Oktober 2021 di Desa Lermatang.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak K.F. Laritmas (Pendeta jemaat GPM Lermatang), Oktober 2021 di Desa Lermatang.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Gustav Lamere (kepala Pemerintah Lermatang), Oktober 2021 di Desa Lermatang.

⁷² Wawancara dengan Bapak Jantje Rangkoly (mantan Kepala Desa Lermatang), Oktober 2021 di Desa Lermatang.

adat;⁷³Jika tidak melayani masyarakat, untuk jual tanah mereka, rumahnya dibakar.⁷⁴

Dari tuturan informan di atas, nampak bahwa pada awalnya kepala desa (mantan kepala desa) telah mengambil keputusan yang tepat yakni tidak menyetujui penjualan tanah karena alasan tanah sebagai warisan leluhur dan sebagai identitas dari masyarakat Lermatang, Menjual tanah berarti menjual diri atau identitas mereka. Tetapi karena berbagai tekanan yang dilakukan oleh anggota masyarakat (dalam hal ini para penjual) yang mengancam nyawa dan keluarganya sehingga beliau terpaksa mengalah. Selain itu, tidak semua pimpinan desa memiliki perspektif yang sama. Ada pimpinan masyarakat (staf desa) yang juga memihak kepada para penjual dan secara diam-diam melakukan mediasi dan negosiasi dengan penguasa local untuk menjual tanah masyarakat.

Hal tersebut semakin parah ketika alih kepemimpinan desa yang baru oleh kepala desa terpilih (raja terpilih). Mestinya masyarakat diatur dan dipersiapkan secara baik, tetapi tidak ada nampak tanda-tanda niat baik dari pimpinan desa yang baru untuk menyiapkan masyarakat termasuk pembuatan perda. Bahkan ada informan yang mengatakan pimpinan desa tidak melakukan apa-apa; sejak terpilih sampai dengan sekarang ini, tidak pernah ada pertemuan desa (rapat) bahkan beberapa kegiatan yang seharusnya membutuhkan kehadiran kepala desa, tetapi yang bersangkutan tidak hadir dalam pertemuan tersebut.⁷⁵ Informan mengatakan sebagai berikut:

Kepala desa mesti buat perdes. Baru 1 kegiatan yang dilakukan, Orang Lermatang hidup tanpa pimpinan, padahal ada banyak masalah yang terjadi di desa. Malah kepala desa cari masyarakat untuk jual tanah. Sejak dilantik sampai dengan sekarang ini, belum ada rapat perdana, sambutan-sambutan tidak ada yang mewakili kaur pemerintahan. Untuk saat ini Lermatang bagaikan hanyut karena hidup tanpa pimpinan. Padahal kita sudah buat tim dan program-program dan dilantik secara adat. Tetapi masih belum dilakukan apa-apa.⁷⁶

Terkait dengan penjualan tanah, seorang informan mengatakan :

⁷³ Wawancara dengan Bapak Metan Marte, Oktober 2021 di Desa Lermatang

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Metan Marte, Oktober 2021 di Desa Lermatang

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak NN, Oktober 2021 di Desa Lermatang

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak NN, Oktober 2021 di Desa Lermatang.

*Ke depan kepala desa mesti membuat Perdes. Atau minimal surat keputusan Desa terkait harga tanah; tetanaman; paisr dan batu. Sampai sekarang belum ada Perdes.*⁷⁷

Informasi tentang ketidakaktifan Kepala Desa sejak beliau terpilih yang disampaikan oleh beberapa informan di atas, kemudian dikonfirmasi lagi oleh peneliti kepada Pimpinan Desa (Raja) dimaksud.

Dari hasil wawancara dengan beliau, diinformasikan bahwa terpilihnya Dia menjadi Raja disertai dengan adanya Pro dan Kontra dari masyarakat terkait pemilihan raja. Kelompok yang kontra, menolak bekerjasama dan menyatakan ketidakpuasan mereka dengan melakukan aksi menghancurkan Kantor Desa beberapa saat setelah terpilihnya beliau sebagai Raja desa Lermatang.⁷⁸

Informasi tersebut dibenarkan juga oleh beberapa informan bahwa terjadi konflik pemilihan Raja/Kepala Desa antara mereka yang pro dan kontra. Akibatnya yang merasa kalah melakukan penyerangan ke Kantor Desa sehingga sampai dengan sekarang Kantor Desa tidak layak digunakan. Akibat dari konflik tersebut, yang kalah dan masih menjabat sebagai kaur pemerintahan kemudian dinonaktifkan oleh Raja terpilih dari jabatan kepengurusan desa. Akibatnya terjadi kekosongan dalam struktur kepemimpinan desa.⁷⁹ Situasi ini tentu berdampak dalam proses kepemimpinan di Desa. Hal mana dikemukakan juga oleh beberapa informan sebelumnya terkait dengan perihal kemandekan dalam kegiatan dan kepemimpinan di Desa.

Kehancuran Kantor Desa menyebabkan terjadinya kelumpuhan dalam aktifitas pemerintahan yang berpusat di lokasi kantor. Karena seluruh berkas dan administrasi desapun turun dihancurkan. Sampai sekarang belum dilakukan pembenahan kantor tersebut karena butuh biaya. Lagipula terkait dengan pemanfaatan anggaran keuangan Desa yang sama sekali tidak transparan. Tetapi terkait dengan kesiapan menyambut hadirnya Pertambangan, menurut Raja dan sekretaris desa, pihak pemerintah Kabupaten sudah menyampaikan informasi tersebut dan mereka juga telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pimpinan daerah terkait sosialisasi INPEX dan kesiapan masyarakat menyambut hadirnya kegiatan pertambangan di Lermatang. Lebih lanjut beliau

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Petrus Maskikit, Oktober 2021 di Desa Lermatang.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Akkil Nusmesse (Kepala Desa/Raja) & Bapak Ridolf Kelbulan (Sekrearis Desa), Oktober 2021 di Kota Saumlaki.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Beni Batmetan & Ibu Reni Latumaerissa, Oktober 2021 di Desa Lermatang.

mengatakan juga bahwa sejak tahun 2019 sampai sekarang bahkan dalam waktu dekat akan dilakukan persidangan terkait masalah konflik batas tanah di tanjung Nustual dan akan dilakukan pembebasan lahan lokasi /wilayah Nustu'al (Tanjung Tu'al).⁸⁰

Lenih lanjut menurutnya sudah ada sosialisasi ke masyarakat dari Amdal Pattimura, tim Ahli (Trisakti). Dalam kontrak ini bukan yang terakhir. Menang dalam kontrak tahun 2019 telah selesai untuk Kilang minyak penggusuran di tanjung Nustu'al. Terkait dengan musyawarah harga tanah untuk menentukan objek tanah dan tetanaman masih dalam percakapan. Bagi kami, tanah dilihat sebagai saudara perempuan. Dan sampai sekarang belum ada kepastian nilai objek tanah, sudah diserahkan ke Pemerintah kabupaten.

Dari hasil wawancara di atas, maka kita dapat memahami masalah-masalah situasi politik terkait kepemimpinan di desa Lermatang yang salah satunya karena adanya konflik internal di antara mereka, dan mesti segera diselesaikan. Sehingga tidak semakin berlarut-larut. Demikian halnya masalah Perdes sebagaimana diungkapkan oleh informan (tokoh adat) sebagai berikut:

Saya sangat resah, tanah itu milik orangtua kita; tanah adalah identitas kita; sekarang ini karena butuh uang, hutan-hutan ditebang padahal tanah merupakan titipan untuk anak-cucu. Ini sangat disesalkan, kurang ada pengawasan dari semua pihak. Bahkan dari pemerintah kurang menopang adat. Bahkan dalam kasus penjualan tanah, masing-masing orang cari keuntungan.⁸¹ Ke depan kepala desa mesti membuat Perdes. Atau minimal surat keputusan Desa terkait harga tanah; tetanaman; pasir dan batu.⁸²

Sebenarnya ada kesadaran masyarakat bahwa tanah itu adalah identitas mereka dan karena itu tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi kesadaran itu belum cukup, mesti ditunjang oleh sebuah regulasi atau aturan Desa yang tentu saja menjadi keputusan dan kesepakatan bersama pimpinan untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi sikap masyarakat termasuk penjualan tanah. Selain itu, belum adanya pengawasan termasuk dari pihak pemerintah desa terkait dengan masalah-masalah yang terjadi. Salah satunya karena adanya konflik internal (pro-kontra) pasca pemilihan Kepala Desa. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan besar

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Akkil Nusmesse (Kepala Desa/Raja) & Bapak Ridolf Kelbulan (Sekrearis Desa), Oktober 2021 di Kota Saumlaki.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Gustav Lamere (kepala Pemerintah Lermatang), Oktober 2021 di Desa Lermatang.

⁸² Wawancara dengan Bapak Gustav Lamere (kepala Pemerintah Lermatang), Oktober 2021 di Desa Lermatang.

bagi masyarakat apalagi membangun kesatuan dalam menyambut Proyek Nasional di desa Lermatang.

3.4. Peran Gereja menyiapkan umat menyambut beroperasinya penambangan Migas Blok Masela

Isu MEA (Maluku Energi Abadi) dan Blok Masela tahun 2015. Tahun 2015 belum ada locus yang pasti untuk pembanguna Blok Masela, ini juga menjadi perebutan bagi beberapa Kabupaten. Diantaranya Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Aru yang juga ikut merebut penetapan locus Blok Masela sampai dengan Kabupaten MBD yang juga berusaha untuk menjadi locus pertambangan ini, dan pada akhirnya Pemerintah memutuskan locus Tambang Migas berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemerintah bekerjasama dengan Inpex dan menyekolahkan anak-anak Tanimbar di Cepu, dan di Politeknik Negeri Ambon juga akan membuka Pertambangan, kemudian mulai didorong untuk masyarakat yang punya ketrampilan dibidang lain bukan saja Sarjana Migas. Karena pembukaan ini bukan lagi untuk Sarjana Migas saja, tapi masih membutuhkan Sarjana yang lainnya, karena waktu Inpex mulai kerja eksplorasi las bawah air tidak ada yang punya keahlian dibidang itu untuk Daerah Maluku, maka dari itu mereka mencari orang kerja langsung dari luar daerah. Ada juga BLK (Badan Latihan Kerja) yang sudah beberapa kali juga Gereja buat untuk jemaat, dalam hal ini Klasis Tanimbar Selatan, yang mengirim beberapa orang untuk ikut di Kota Ambon. Jemaat GPM Seira yang banyak, sejak PJ masuk di Jemaat GPM Seira, PJ punya hubungan kerjasama dengan BLK (Badan Latihan Kerja), jadi sudah ada satu jemaat yang beberapa kali ikut BLK (Badan Latihan Kerja) diantaranya mulai dari servis HP dan desain grafik yang diikuti serta dua orang anggota jemaat, yang dilakukan juga pada tahun 2019. Namun ada satu kerepotan yaitu perencanaan dibawah belum terlalu baik untuk sentra-sentra produksi karena itu penyiapan masyarakat untuk bidang pertanian dan perencanaan pengembangan pemerintah untuk sentra produksi, kalau dulu ada sejak zaman Bpk BST itu dibagi pada daerah masing-masing dengan hasil dan produk unggul dari masing-masing daerah, tapi sekarang ini sudah tidak nampak lagi hanya ada di Kandar, karena Kandar mulai produksi padi maka Kandar yang selalu panen raya setiap tahun untuk padi itu ada padi merah maupun padi ladang. Jadi gereja mendorong beberapa hal yang berfokus pada pendidikan, tapi pertanian dan perikanan saja yang masih kerepotan karna disini punya rencana fokus untuk pengembangan diri dan kemampuan di bidang pertanian dan perikanan itu tidak jelas dari kampung mana atau jemaat mana itu tidak dapat dipastikan dan tidak ada kerjasama pemerintah dan gereja.

Gereja mulai berdiskusi dengan pemerintah mulai dari yang memproduksi pateka di Jemaat Wunla untuk produksi buah-buahan di Fordata itu lemon tapi beberapa tahun

belakangan ini tidak ada lagi program pendampingan masyarakat untuk itu. Kalau gereja sendiri ada YPLH Dulos (Yayasan Pemerhati Lingkungan Dulos). Ada juga Tanjung NusTualebagai pelabuhan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi itu, untuk membantu pemerintah yang diputuskan juga oleh pemerintah karna dan pemerintah juga yang pertama turun untuk konsultasi publik penyusunan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), hal itu merupakan pertemuan yang berlanjut sampai di Ambon dengan pemerintah dan seluruh stakeholder dan tokoh-tokoh agama.

RT : Katong minta jata juga untuk inpeks presentasi pada Yayasan Pemerhati Lingkungan Hidup yang isinya pendeta-pendeta, kemudian kumpul di aula kantor klasispada tahun 2019. Tapi lagi-lagi menurut beta pribadi barang ini masih galap, masih beberapa orang saja yang tahu dan informasinya pun ditutup, hingga skrang orang seng tau titiknya kemana, karna batas-batas ini cuma dong bilang Bomaki, Lermatang, Lat dalam dan informasi terakhir hanya di Lermatang saja. Tapi memang ada beberapa informasi yang ditutup supaya orang tidak lagi menjual tanah. Ada 25 blok yang ada di Maluku (Bpk BM), pemilik tenaga security untuk perusahaan migas sedunia (Bpk JL) antua mau kasih CSR (Corporate Sosial Responsibility) itu antua kasih pelatihan bertaraf internasional, jadi katong bisa kerjasama deng beberapa orang itu yang penting katong bicara deng Pemda dan Bapak Bupati. CSR(Corporate Sosial Responsibility) turun kasih latih disini untuk 40 orang yang akan ikut pelatihan tersebut.ⁱ

Kemudian Dokumen AMDAL itu ada 3 dokumen, diantaranya Buku 1, Buku 2 dan Buku 3, tapi itu menjadi 1 dokumen yang tidak dipisahkan, yang pertama itu KA (Kerangka acuan), yang kedua itu ANDAL (Acuan analisis), dan yang ketiga RPL (Rencana pengelolaan lingkungan) dan yang baru selesai itu KA (Kerangka acuan), tersisa 2 dokumen.

Gereja juga minta dilibatkan dalam proses ini mulai dari penyusunan dokumen AMDAL dan survei lapangan pun tidak di ijin. Hanya ada 1 anak Maluku yang ikut menyusun AMDAL yaitu Ibu DP dengan Ketua pusat study lingkungan hidup yang sama-sama dalam proses ini. Namun informasi yang didapat setelah dengan FGD inpeks sementara kerepotan, karna ini produksinya sangat besar, contoh saja kalau sekarang dia langsung beroperasi lalu pasarnya dimana ? pemerintah belum menyiapkan itu, karena sampai

dikebutuhkan pasar yang tidak ada titik terangnya. Inpex juga berhadapan dengan US Oil yang akan beroperasi dan mendapat pasarnya itu di Jepang dan China tapi US Oil itu keluar ini, juga mengambil banyak pasaran sampai di Koreo. Kemudian di tengah-tengah kebutuhan pasar, barulah BUMN-BUMN bekerja sama dengan Petrokimia, PLN, dan Pertamina supaya inpex produksi dan perusahaan-perusahaan inilah yang bekerjasama dengan PLN untuk mengganti pembangkit tenaga diesel.

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) adalah sebagai penggerak mua (primer mover). Primer mover merupakan peralatan yang mempunyai fungsi menghasilkan energi mekanis yang diperlukan untuk memutar rotor generator. ⁱⁱ

RT : Beta cerita sedikit, dulu yang beta tau ini kan inpex, seng bali asset tapi sewa, karna ada rekanan yang siapkan semua kebutuhan inpex. Rekanan itu adalah anak-anak perusahaan dibawah inpex, dan rekanan-rekanan ini menyiapkan mulai dari mobil untuk aktifitas yang mereka pakai dalam jangka waktu yang lama, sekalipun harga sewa mobil 1 tahun itu diperkirakan sudah bisa membeli Imobil dan juga inpex sewa untuk tempat tinggal, bukan beli atau bangun sendiri, jadi ada perusahaan-perusahaan yang berebutan untuk dapat memenuhi kebutuhan inpex, mulai dari perusahaan catering dan kebutuhan-kebutuhan inpex lainnya yang selalu dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian pernah ada info kalau inpex akan beroperasi di Adaut, lalu ada perusahaan dari Surabaya yang langsung membeli tanah-tanah di Adaut, dan ternyata lokasi beroperasinya inpex bukan di Adaut, dan ada anak-anak dari Adaut sendiri juga mengambil keuntungan dari sini, dan yang membuat kericuan itu sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan kecil, dan yang paling nampak ialah tidak adanya pengembangan masyarakat untuk menyambut blok masela.

Masyarakat yang tidak siap dan pemerintah yang tidak menyiapkan masyarakat, ini adalah bagian dari krisis memanusiaikan manusia.

Atas nama Pendeta dan Yayasan kami sudah berjuang dengan seluruh tenaga yang dikuras habis tapi tidak ada hasilnya, namun tidak menjadi persoalan karena nanti tetap akan menjadi pertanggungjawaban moral yang sudah pasti kita punya itu, dari usaha yang sudah dilakukan, tapi kalau masyarakat tidak menyadari perjuangan yang sudah dilakukan oleh gereja dan tetap menjual tanah yang dilambangkan sebagai “Saudara perempuan” sesuai adat. Maka jika mereka tetap menjual tanah, bearti sama halnya dengan menjual saudara perempuan sendiri.

Tanah dijual dengan harga 10.000 permeter oleh pengusaha dari masyarakat dan Kembali dijual dengan harga yang lebih tinggi kepada inpeks.

Advokasi gereja sudah menyampaikan bagi jemaat bahwa kalau ini menjadi Proyek Nasional, kita tidak dapat berbuat apa-apa dalam bentuk apapun, tapi kalau masyarakat bisa apalagi kalau tipikal masyarakatnya itu tidak dijual dan hanya sewa, tapi kalau harus dijual berarti harganya harus pantas dan itu bukan ada orang ketiga yang masuk untuk beli, karna kalau sampai hal itu terjadi tetap jemaat yang menjadi korban, dan terbukti dengan harga tanah yang sekarang di Kabupaten Kepulauan Tanimbar harganya sudah 200.000-500.000 permeter dan itu merupakan perbandingan yang sangat jauh dari pembelian pertama langsung dari masyarakat yang punya tanah.

Ada hal lain yang tidak melibatkan gereja, dan mereka mencari jalan pintas, dan sebetulnya yang punya hak dengan tanah ialah pemerintah desa dan melalui itulah jalan pintas yang dimaksudkan. Sebenarnya dari desa bisa saja membuat PERDES namun ada factor-faktor internal yang membuat pemerintah desa tidak dapat bekerja dengan maksimal.

Gereja menyediakan BLK dan bekerja sama dengan Parpem untuk menyambut Blok Masela. Sudah ada lokasi untuk Parpem dan akan menjadi pusat pengelolaan pertanian supaya ada pelatihan masyarakat dan petani, peternakan dan nelayan. Mereka membutuhkan tanah seperti di Uraur sebagai tempat pelatihan, karena kebetulan itu menjadi tanah sengketa dan Gereja juga sudah mengusulkan untuk Parpem akan membayar siri pinang bagi tanah itu, kemudian dari airu supaya ada satu lokasi yang bisa berguna bagi masyarakat dan jemaat mulai dari pertanian, peternakan, nelayan dan pelatihan-pelatihan di beberapa bidang sesuai dengan keahlian masing-masing, bisa juga jadi tempat produksi.

Masyarakat mengatakan bahwa mereka adalah masyarakat adat dan tanah-tanah yang mereka punya itu tanah adat, namun tidak ada satupun PERDA yang menyebutkan mereka adalah masyarakat adat, atau PERNEG pun demikian tidak dapat membuktikan karna tidak ada peraturan tertulis tentang hal demikian.

Gereja sudah berulang-ulang kali melakukan advokasi tanah, sampai pada saat Sidang Klasis, seruan gembala untuk tetap menjaga tanah dan tidak boleh diperjual-belikan. Namun kenyataan yang tidak sejalan dengan apa yang sudah dilakukan oleh gereja, oleh sebab itu kita bisa mengambil keputusan bahwa Advokasi berjenjang yang tidak utuh, daya jejaringan yang tidak kuat dan itu yang membuat masyarakat miskin akan informasi dan pada akhirnya

masyarakat tidak dapat menyiapkan apapun yang memang harusnya masyarakat siapkan untuk mereka sendiri, pemerintah membagikan informasi hanya untuk orang-orang tertentu supaya masyarakat umum tidak tahu dan ini menjadi upaya dari pemerintah itu sendiri dan juga keterbatasan sumber daya manusia dan konsumerisme masyarakat yang sudah membuat mereka menjadi serakah untuk menjual tanah dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi kedepan jika semua tanah dijual dengan harga murah.

3.5 SIKAP GEREJA (PELAYAN) DI LERMATANG

Dari hasil wawancara dengan informan⁸³, gereja telah melakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Gereja melakukan pembinaan umat dan proses penyadaran dalam upaya mempersiapkan umat menyambut beroperasinya pertambangan yang akan terjadi pada tahun 2027 sampai dengan 2050. Peran aktif gereja nampak ketika gereja terlibat dan ikut serta dalam berbagai kegiatan sejak Tim Survei turun kelokasi, maupun dalam berbagai kegiatan Sosialisasi di tingkat kabupaten dan kecamatan terkait rencana kegiatan dimaksud. Salah satu cara mempersiapkan umat juga nampak ketika gereja menyusun program kerja dalam menjawab situasi dan kondisi masyarakat secara khusus untuk menyiapkan masyarakat menyambut hadirnya INPEX. Salah satunya kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh jemaat GPM Lermatang maupun keterlibatan dalam program Klasis (pelatihan membuat mebel, kursi dari bamboo, rak buku dari rotan, muatan local, bengkel dan pelatihan lainnya).⁸⁴
- b. Gereja memperjuangkan supaya pemerintah Kabupaten menyediakan beasiswa bagi anak-anak untuk studi lanjut. Menurut Pendeta, sudah 3 tahun belakangan ini, saya memperjuangkan anak-anak Lermatang untuk melanjutkan studinya di Sekolah Pertambangan Migas di Cepu. Dari data yang diperoleh, ada 9 orang anak daerah yang telah melakukan studi lanjut ke Sekolah pertambangan di Cepu, terdiri dari tahun 2019 :2 orang; tahun 2020 : 3 orang dan tahun 2021 : 4 orang.
- c. Gereja melakukan pembinaan dan proses penyadaran terhadap anggota masyarakat terkait penyimpangan perilaku umat dan masalah –masalah yang

⁸³ Wawancara dengan Bapak F.C. Latritmas (Ketua Majelis jemaat GPM), Oktober 2021 di Desa Lermatang.

⁸³ Wawancara dengan Bapak F.C. Latritmas (Ketua Majelis jemaat GPM), Oktober 2021 di Desa Lermatang

⁸⁴Wawancara dengan Ibu Reni Latumaerisa (Mantan Bendahara Jemaat GPM Lermatang), Oktober 2021 di Desa Lermatang

terjadi belakangan ini. Proses pembinaan mana dilakukan bukan saja dalam peribadatan umat tetapi juga dalam pendampingan informal yang dilakukan oleh para pelayan terhadap umatnya. Termasuk menyadarkan masyarakat supaya tidak melakukan praktek penjualan tanah.

- d. Gereja berperan aktif untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat termasuk hak atas tanah atau melakukan advokasi terhadap hak-hak ulayat masyarakat. Telah terjadi pembodohan terhadap masyarakat, penyerabotan tanah, dan perampasan terhadap hak-hak masyarakat. Di sinilah gereja perlu hadir dan melakukan proses pendampingan tapi juga advokasi bagi masyarakat. Advokasi terhadap masyarakat tersebut dilakukan ketika terjadi pertemuan dengan Pimpinan di Tingkat kabupaten maupun kecamatan.
- e. Gereja telah membangun Kerjasama dengan pemerintah untuk secara bersama mempersiapkan anggota masyarakat terkait kehadiran dan beroperasinya INPEX maupun dengan pimpinan gereja yang lainnya (GKPII). Sekalipun memang ada latarbelakang masa lalu yang pahit⁸⁵, tetapi tetap mereka membangun hubungan kerjasama dan komunikasi secara baik dengan anggota gereja lainnya. Menurut pelayan jemaat GPM, hubungannya dengan pendeta GKPII baik sekali, mereka sering bertemu dan berdialog mempercakapkan masalah dan mencari solusi bagi situasi yang sedang dialami. Bahkan sering juga dilakukan pertukaran mimbar diantara GPM dan GKPII.

⁸⁵ Pada tahun 1976 terjadi perpecahan dalam gereja dimana seluruh umat GPM beralih dan masuk ke keanggotaan GKPII. Hanya sekitar 6 KK yang tersisa, dan mereka juga mengalami penderitaan dan penganiyaan oleh saudara-saudara mereka karena tetap memilih di GPM. Dari beberapa KK tersebut, sekarang keanggotaan GPM telah bertambah menjadi 176 KK.

3.2.Peran Gereja menyiapkan umat menyambut beroperasinya penambangan Migas Blok Masela

Isu MEA (Maluku Energi Abadi) dan Blok Masela tahun 2015. Tahun 2015 belum ada locus yang pasti untuk pembanguna Blok Masela, ini juga menjadi perebutan bagi beberapa Kabupaten. Diantaranya Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Aru yang juga ikut merebut penetapan locus Blok Masela sampai dengan Kabupaten MBD yang juga berusaha untuk menjadi locus pertambangan ini, dan pada akhirnya Pemerintah memutuskan locus Tambang Migas berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemerintah bekerjasama dengan Inpex dan menyekolahkan anak-anak Tanimbar di Cepu, dan di Politeknik Negeri Ambon juga akan membuka Pertambangan, kemudian mulai didorong untuk masyarakat yang punya ketrampilan dibidang lain bukan saja Sarjana Migas. Karena pembukaan ini bukan lagi untuk Sarjana Migas saja, tapi masih membutuhkan Sarjana yang lainnya, karena waktu Inpex mulai kerja eksplorasi las bawah air tidak ada yang punya keahlian dibidang itu untuk Daerah Maluku, maka dari itu mereka mencari orang kerja langsung dari luar daerah. Ada juga BLK (Badan Latihan Kerja) yang sudah beberapa kali juga Gereja buat untuk jemaat, dalam hal ini Klasis Tanimbar Selatan, yang mengirim beberapa orang untuk ikut di Kota Ambon. Jemaat GPM Seira yang banyak, sejak PJ masuk di Jemaat GPM Seira, PJ punya hubungan kerjasama dengan BLK (Badan Latihan Kerja), jadi sudah ada satu jemaat yang beberapa kali ikut BLK (Badan Latihan Kerja) diantaranya mulai dari servis HP dan desain grafik yang diikuti serta dua orang anggota jemaat, yang dilakukan juga pada tahun 2019. Namun ada satu kerepotan yaitu perencanaan dibawah belum terlalu baik untuk sentra-sentra produksi karena itu penyiapan masyarakat untuk bidang pertanian dan perencanaan pengembangan pemerintah untuk sentra produksi, kalau dulu ada sejak zaman Bpk BST itu dibagi pada daerah masing-masing dengan hasil dan produk unggul dari masing-masing daerah, tapi sekarang ini sudah tidak nampak lagi hanya ada di Kandar, karena Kandar mulai produksi padi maka Kandar yang selalu panen raya setiap tahun untuk padi itu ada padi merah maupun padi ladang. Jadi gereja mendorong beberapa hal yang berfokus pada pendidikan, tapi pertanian dan perikanan saja yang masih kerepotan karena disini punya rencana fokus untuk pengembangan diri dan kemampuan di bidang pertanian dan perikanan itu tidak jelas dari kampung mana atau jemaat mana itu tidak dapat dipastikan dan tidak ada kerjasama pemerintah dan gereja.

Gereja mulai berdiskusi dengan pemerintah mulai dari yang memproduksi pateka di Jemaat Wunla untuk produksi buah-buahan di Fordata itu lemon tapi beberapa tahun belakangan ini

tidak ada lagi program pendampingan masyarakat untuk itu. Kalau gereja sendiri ada YPLH Dulos (Yayasan Pemerhati Lingkungan Dulos). Ada juga Tanjung NusTualsebagai pelabuhan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi itu, untuk membantu pemerintah yang diputuskan juga oleh pemerintah karna dan pemerintah juga yang pertama turun untuk konsultasi publik penyusunan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), hal itu merupakan pertemuan yang berlanjut sampai di Ambon dengan pemerintah dan seluruh stakeholder dan tokoh-tokoh agama.

RT : Katong minta jata juga untuk inpeks presentasi pada Yayasan Pemerhati Lingkungan Hidup yang isinya pendeta-pendeta, kemudian kumpul di aula kantor klasispada tahun 2019. Tapi lagi-lagi menurut beta pribadi barang ini masih galap, masih beberapa orang saja yang tahu dan informasinya pun ditutup, hingga skrang orang seng tau titiknyanya kemana, karna batas-batas ini cuma dong bilang Bomaki, Lermatang, Lat dalam dan informasi terakhir hanya di Lermatang saja. Tapi memang ada beberapa informasi yang ditutup supaya orang tidak lagi menjual tanah. Ada 25 blok yang ada di Maluku (Bpk BM), pemilik tenaga security untuk perusahaan migas sedunia (Bpk JL) antua mau kasih CSR (Corporate Sosial Responsibility) itu antua kasih pelatihan bertaraf internasional, jadi katong bisa kerjasama deng beberapa orang itu yang penting katong bicara deng Pemda danBapak Bupati. CSR(Corporate Sosial Responsibility) turun kasih latih disini untuk 40 orang yang akan ikut pelatihan tersebut.ⁱⁱⁱ

Kemudian Dokumen AMDAL itu ada 3 dokumen, diantaranya Buku 1, Buku 2 dan Buku 3, tapi itu menjadi 1 dokumen yang tidak dipisahkan, yang pertama itu KA (Kerangka acuan), yang kedua itu ANDAL (Acuan analisis), dan yang ketiga RPL (Rencana pengelolaan lingkungan) dan yang baru selesai itu KA (Kerangka acuan), tersisa 2 dokumen.

Gereja juga minta dilibatkan dalam proses ini mulai dari penyusunan dokumen AMDAL dan survei lapangan pun tidak di ijinakan. Hanya ada 1 anak Maluku yang ikut menyusun AMDALyaitu Ibu DP dengan Ketua pusat study lingkungan hidup yang sama-sama dalam proses ini.

Namun informasi yang didapat setelah dengan FGD inpeks sementara kerepotan, karna ini produksinya sangat besar, contoh saja kalau sekarang dia langsung beroperasi lalu pasarnya dimana ? pemerintah belum menyiapkan itu, karena sampai dibutuhkan pasar yang tidak ada titik terangnya. Inpeks juga berhadapan dengan US Oil yang akan beroperasi dan mendapat pasarnya itu di Jepang dan China tapi US Oil itu keluar ini, juga mengambil banyak pasaran

sampai di Koreo. Kemudian di tengah-tengah kebutuhan pasar, barulah BUMN-BUMN bekerja sama dengan Petrokimia, PLN, dan Pertamina supaya inpeks produksi dan perusahaan-perusahaan inilah yang bekerjasama dengan PLN untuk menganti pembangkit tenaga diesel.

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) adalah sebagai penggerak mua (primer mover). Primer mover merupakan peralatan yang mempunyai fungsi menghasilkan energi mekanis yang diperlukan untuk memutar rotor generator. ^{iv}

RT : Beta cerita sedikit, dulu yang beta tau ini kan inpeks, seng bali asset tapi sewa, karna ada rekanan yang siapkan semua kebutuhan inpeks. Rekanan itu adalah anak-anak perusahaan dibawah inpeks, dan rekanan-rekanan ini menyiapkan mulai dari mobil untuk aktifitas yang mereka pakai dalam jangka waktu yang lama, sekalipun harga sewa mobil 1 tahun itudiperkirakan sudah bisa membeli Imobil dan juga inpeks sewa untuk tempat tinggal, bukan beli atau bangun sendiri, jadi ada perusahaan-perusahaan yang berebutan untuk dapat memenuhi kebutuhan inpeks, mulai dari perusahaan catering dan kebutuhan-kebutuhan inpeks lainnya yang selalu dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian pernah ada info kalau inpeks akan beroperasi di Adaut, lalu ada perusahaan dari Surabaya yang langsung membeli tanah-tanah di Adaut, dan ternyata lokasi beroperasinya inpeks bukan di Adaut, dan ada anak-anak dari Adaut sendiri juga mengambil keuntungan dari sini, dan yang membuat kericuan itu sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan kecil, dan yang paling nampak ialah tidak adanya pengembangan masyarakat untuk menyambut blok masela.

Masyarakat yang tidak siap dan pemerintah yang tidak menyiapkan masyarakat, ini adalah bagian dari krisis memanusiakan manusia.

Atas nama Pendeta dan Yayasan kami sudah berjuang dengan seluruh tenaga yang dikuras habis tapi tidak ada hasilnya, namun tidak menjadi persoalam karena nanti tetap akan menjadi pertanggungjawaban moral yang sudah pasti kita punya itu, dari usaha yang sudah dilakukan, tapi kalau masyarakat tidak menyadari perjuangan yang sudah dilakukan oleh gereja dan tetap menjual tanah yang dilambangkan sebagai “Saudara perempuan” sesuai adat. Maka jika mereka tetap menjual tanah, bearti sama halnya dengan menjual saudara perempuan sendiri.

Tanah dijual dengan harga 10.000 permeter oleh pengusaha dari masyarakat dan Kembali dijual dengan harga yang lebih tinggi kepada inpeks.

Advoksi gereja sudah menyampaikan bagi jemaat bahwa kalau ini menjadi Proyek Nasional, kita tidak dapat berbuat apa-apa dalam bentuk apapun, tapi kalau masyarakat bisa apalagi

kalau tipikal masyarakatnya itu tidak dijual dan hanya sewa, tapi walaupun harus dijual berarti harganya harus pantas dan itu bukan ada orang ketiga yang masuk untuk beli, karna kalau sampai hal itu terjadi tetap jemaat yang menjadi korban, dan terbukti dengan harga tanah yang sekarang di Kabupaten Kepulauan Tanimbar harganya sudah 200.000-500.000 permeter dan itu merupakan perbandingan yang sangat jauh dari pembelian pertama langsung dari masyarakat yang punya tanah.

Ada hal lain yang tidak melibatkan gereja, dan mereka mencari jalan pintas, dan sebetulnya yang punya hak dengan tanah ialah pemerintah desa dan melalui itulah jalan pintas yang dimaksudkan. Sebenarnya dari desa bisa saja membuat PERDES namun ada factor-faktor internal yang membuat pemerintah desa tidak dapat bekerja dengan maksimal.

Gereja menyediakan BLK dan bekerja sama dengan Parpem untuk menyambut Blok Masela. Sudah ada lokasi untuk Parpem dan akan menjadi pusat pengelolaan pertanian supaya ada pelatihan masyarakat dan petani, peternakan dan nelayan. Mereka membutuhkan tanah seperti di Uraur sebagai tempat pelatihan, karena kebetulan itu menjadi tanah sengketa dan Gereja juga sudah mengusulkan untuk Parpem akan membayar siri pinang bagi tanah itu, kemudian dari airu supaya ada satu lokasi yang bisa berguna bagi masyarakat dan jemaat mulai dari pertanian, peternakan, nelayan dan pelatihan-pelatihan di beberapa bidang sesuai dengan keahlian masing-masing, bisa juga jadi tempat produksi.

Masyarakat mengatakan bahwa mereka adalah masyarakat adat dan tanah-tanah yang mereka punya itu tanah adat, namun tidak ada satupun PERDA yang menyebutkan mereka adalah masyarakat adat, atau PERNEG pun demikian tidak dapat membuktikan karna tidak ada peraturan tertulis tentang hal demikian.

Gereja sudah berulang-ulang kali melakukan advokasi tanah, sampai pada saat Sidang Klasis, seruan gembala untuk tetap menjaga tanah dan tidak boleh diperjual-belikan. Namun kenyataan yang tidak sejalan dengan apa yang sudah dilakukn oleh gereja, oleh sebab itu kita bisa mengambil keputusan bahwa Advokasi berjenjang yang tidak utuh, daya jejaringan yang tidak kuat dan itu yang membuat masyarakat miskin akan informasi dan pada akhirnya masyarakat tidak dapat menyiapkan apapun yang memang harusnya masyarakat siapkan untuk mereka sendiri, pemerintah membagikan informasi hanya untuk orang-orang tertentu supaya masyarakat umum tidak tahu dan ini menjadi upaya dari pemerintah itu sendiri dan juga keterbatasan sumber daya manusia dan konsumerisme masyarakat yang sudah membuat

mereka menjadi serakah untuk menjual tanah dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi kedepan jika semua tanah dijual dengan harga murah.

BAB IV

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari uraian yang ada pada Bab 4 maka dapat dibuatkan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pengetahuan masyarakat tentang akan hadirnya penambangan migas Blok Masela di Kepulauan Tanimbar khususnya di Jemaat/Desa Lerमतang sesungguhnya sudah ada namun pengetahuan itu belum paripurna. Masih ada pengetahuan tentang penambangan ini yang belum sepenuhnya disampaikan kepada masyarakat. Hal ini nampak dalam beberapa pengakuan yang diutarakan oleh masyarakat seperti yang sudah tergambar di dalam bab sebelumnya
2. Pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terkait akan beroperasinya Blok Masela turut memberi pengaruh pada sikap dan perilaku yang ditunjukkan masyarakat. Sikap itu mengarah pada sikap positif maupun negatif dalam menyambut pengoperasian penambangan migas tersebut.
3. Rencana pengoperasian penambangan migas ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat namun juga memberikan dampak negatif.
4. Kesiapan masyarakat dalam menyambut kehadiran Blok Masela belum terlalu nampak walaupun sebagian masyarakat bahkan pemerintah daerahpun mengatakan bahwa masyarakat sudah siap menyambut kehadiran Blok Masela. SDM yang dibutuhkan untuk itu belum siap dan karenanya membutuhkan SDM siap yang berasal dari luar daerah.
5. Gereja sebagai lembaga agama memiliki peran dalam hal membantu pemerintah menyiapkan umat menyambut kehadiran penambangan migas ini. sepanjang ini Gereja sudah melakukan advokasi kepada umat namun masih dibutuhkan lagi tindakan konkrit yang lebih menohok pada penyiapan SDM umat menyambut kehadiran Blok Masela yang sudah di depan mata.

5.2. Saran

Beberapa saran perlu disampaikan kepada beberapa pihak yakni :

1. Masyarakat mesti memiliki akses pengetahuan yang lebih luas lagi terkait informasi tentang rencana pengoperasian tambang migas Blok Masela agar tidak mudah diperdaya oleh orang lain yang justru ingin mengeruk keuntungan dibalik minimnya pengetahuan masyarakat

2. Masyarakat perlu didorong lagi untuk menyiapkan SDM yang siap menjemput pasar kerja di bidang migas ini. generasi muda disekolahkan tetapi juga generasi yang usia produktif kerja dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan siap agar bisa dipakai di pasar kerja migas ini.
3. Pemerintah daerah mesti menyediakan semakin banyak beasiswa untuk menyekolahkan generasi mudanya tetapi juga membuka wawasan berpikir masyarakat untuk membaca peluang-peluar usaha di sekitaran area tambang.
4. Gereja harus menjadi lembaga yang dapat menyuarakan keberiphakan kepada umat sehingga umat tidak menjadi pihak yang dikirbankan oleh negara dalam hal ini perusahaan tambang. Serta bersinergi dengan pemerintah untuk menyiapkan umat untuk menguayakan peluang psar di seputaran wilayah tambang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyona C, et al., 2018, *Menenun Injil di Kepulauan Tanimbar; Sejarah Perkembangan Protentanisme di Tanimbar*, Ambon, UKIM Press.
- Boon Siong Neo dan Geraldine Chan. 2009. *Dynamic Governance*. Singapore: Times.
- Fatmawati; Budiman; Dyastari, Letizia. 2017. "Dampak Lingkungan Galian Tambang Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur."
- Jimmy N, et al, *Dampak pertambangan batubara dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat di desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan*, Jurnal Ilmu administrasi negara Vol 8 No 2 November 2020
- Leibo, Jefta. 1986. *Sosiologi Pedesaan: Desa Kita Sebuah Potret Perubahan dalam Kesenambungan, Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda*. Jakarta: Andi Offset
- Nogroho Rian. 2018. *Public Policy* (edisi revisi). Jakarta: Elex Media Komputindo
- Otto, Soemarwoto. 2009. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta, Prenada, 1993
- Reni Fitriyanti, *Pertambangan Batu Bara: Dampak Lingkungan, sosial dan ekonomi*, Jurnal redoks, Vol 11 No 1, Januari 2016
- Soerjono, Soekanto. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*. Terjemahannya dari Judul Asli *The Sociology Of Social Change* (1993). Jakarta: Prenada Media
- Teuku Ade Farlevi, et al., *Dampak dan evaluasi kebijakan pertambangan batu bara di Kecamatan Mereubo*, Jurnal risalah Kebijakan pertanian dan lingkungan, Vol 2 No 2 Agustus 2015;

Website

<https://rimbakita.com/sumber-daya-alam/>

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/317460/sk-lokasi-pelabuhan-blok-masela-diterbitkan>

ⁱ Hasil transkrip dari rekaman suara bersama Bpk RT

ⁱⁱ <http://eprints.unm.ac.id>

ⁱⁱⁱ Hasil transkrip dari rekaman suara bersama Bpk RT

^{iv} <http://eprints.unm.ac.id>